



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS KEHUTANAN

RENCANA STRATEGIS
PERUBAHAN

DINAS KEHUTANAN PROVINSI MALUKU UTARA
TAHUN 2020-2024

SOFIFI 2023

KATA PENGANTAR

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan yang lebih berdaya dan berhasil guna, serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan dinas kehutanan, maka disusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024. Berdasarkan susunan perencanaan, Renstra Dinas Kehutanan Maluku Utara Tahun 2020-2024 adalah kerangka umum pembangunan sektor kehutanan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2020-2024.

Renstra ini merupakan perubahan dari Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara sehubungan dengan adanya Pemutahiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 dan perubahan RPJMD Provinsi Maluku Utara Periode 2020-2024 dan selanjutnya Renstra ini menjadi acuan Dinas Kehutanan Maluku Utara dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) tahunan.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dalam mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan di dalam Renstra ini.

Sofifi, Janauri 2023
Kepala Dinas Kehutanan
Provinsi Maluku Utara,



H. M. SUKUR LILA, S.Hut., M.Si.
NIP. 19690505 200112 1 005

DAFTAR ISI

| | |
|--|----|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| DAFTAR TABEL | iv |
| DAFTAR GAMBAR..... | vi |
| BAB I. PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1. Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2. Landasan Hukum | 4 |
| 1.3. Maksud Dan Tujuan..... | 6 |
| 1.4. Sistematika Penulisan | 7 |
| BAB. II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEHUTANAN PROVINSI MALUKU UTARA..... | 9 |
| 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah..... | 12 |
| 2.2. Sumber Daya Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara | 17 |
| 2.2.1. Sumber Daya Manusia | 17 |
| 2.2.2. Aset Yang Dikelola | 20 |
| 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara | 25 |
| 2.4. Kondisi Umum Pembangunan Kehutanan..... | 28 |
| 2.4.1. Gambaran Umum Wilayah Provinsi Maluku Utara | 28 |
| 2.4.2. Kawasan Hutan..... | 29 |
| 2.4.3. Penggunaan Kawasan Hutan..... | 30 |
| 2.4.4. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK).. | 31 |
| 2.4.5. Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)..... | 32 |
| 2.4.6. Lahan Kritis | 34 |
| 2.4.7. Rehabilitasi, Kerusakan Hutan dan Tutupan Lahan..... | 34 |
| 2.4.8. Produksi Kayu..... | 37 |
| 2.4.9. PNBP Sektor Kehutanan..... | 38 |
| 2.4.10. Pemberdayaan Masyarakat | 39 |

| | |
|---|----|
| 2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kehutanan..... | 42 |
| 2.5.1. Tantangan | 42 |
| 2.5.2. Peluang..... | 42 |
| BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH..... | 44 |
| 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah..... | 44 |
| 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih..... | 46 |
| 3.3. Telaahan Renstra Kementerian Kehutanan | 50 |
| 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis | 51 |
| 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis..... | 53 |
| | |
| BAB. IV TUJUAN DAN SASARAN | 56 |
| 4.1. Tujuan Dan Sasaran 2020-2024 | 56 |
| | |
| BAB. V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN..... | 57 |
| | |
| BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN | 59 |
| | |
| BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN | 75 |
| | |
| BAB VIII PENUTUP..... | 76 |

DAFTAR TABEL

| | | |
|-----------|--|----|
| Tabel 1. | UPTD KPH Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara | 17 |
| Tabel 2. | Jumlah Aparatur berdasarkan pendidikan | 18 |
| Tabel 3. | Jumlah Aparatur berdasarkan Golongan | 19 |
| Tabel 4. | Jumlah pegawai berdasarkan golongan dan usia | 20 |
| Tabel 5. | Jumlah pegawai Berdasarkan Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) | 20 |
| Tabel 6. | Rekapitulasi Asset Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara . | 21 |
| Tabel 7. | Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara Tahun 2015-2019 | 25 |
| Tabel 8. | Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara | 26 |
| Tabel 9. | Luas Wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara | 29 |
| Tabel 10. | Luas Kawasan Hutan Provinsi Maluku Utara per Kabupaten Kota | 30 |
| Tabel 11. | Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) Provinsi Maluku Utara | 30 |
| Tabel 12. | Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) | 31 |
| Tabel 13. | Dokumen RPHJP KPH | 33 |
| Tabel 14. | Luas lahan Kritis Provinsi Maluku Utara tahun 2018..... | 34 |
| Tabel 15. | Rehabilitasi dan Kerusakan Hutan 2013 - 2019..... | 35 |
| Tabel 16. | Tutupan Lahan Provinsi Maluku Utara tahun 2018 | 36 |
| Tabel 17. | Tutupan Lahan Provinsi Maluku Utara 2013-2018 | 37 |
| Tabel 18. | Produksi Kayu Maluku Utara 2013-2019..... | 38 |

| | |
|---|----|
| Tabel 19. Daftar PNBPs PSDH dan DR TAHUN 2013-2018..... | 39 |
| Tabel 20. KTH Provinsi Maluku Utara berdasarkan kelasnya | 40 |
| Tabel 21. Izin PS Provinsi Maluku Utara sampai dengan Tahun 2019 | 41 |
| Tabel 22. Tujuan, Sasaran dan Strategi RPJMD yang didukung oleh Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara..... | 49 |
| Tabel 23 . Tujuan dan Sasaran Strategis Jangka Menengah Pelayanan OPD | 56 |
| Tabel 24. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan..... | 57 |
| Tabel 25 : Rencana Program,Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara Tahun 2020..... | 56 |
| Tabel 26 : Rencana Program,Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara Tahun 2021 - 2024.. | 65 |
| Tabel 27. Target capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dalam RPJMD..... | 74 |
| Tabel 28. Target capaian Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) 2020- 2024..... | 75 |

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Kehutanan Propinsi Maluku Utara 9

BAB. I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Provinsi Maluku Utara resmi terbentuk pada tanggal 4 Oktober 1999 melalui Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Provinsi Maluku Utara sebagai provinsi di kepulauan timur Indonesia mempunyai luas wilayah $\pm 145.819,1$ Km² dengan proporsi luas wilayah perairan $\pm 69\%$ dan wilayah daratan $\pm 31\%$.

Provinsi Maluku Utara memiliki kawasan hutan seluas $\pm 2.511.781$ ha atau mencakup 80% dari luas daratan dengan tipe fungsi Hutan Konservasi (HK) seluas ± 219.012 Ha, Hutan Lindung (HL) seluas ± 578.998 ha, Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas ± 675.732 ha, Hutan Produksi (HP) seluas ± 485.323 Ha, serta Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) seluas ± 552.716 ha. Sedangkan areal di luar kawasan hutan terdapat Areal Penggunaan Lain (APL) seluas ± 642.572 ha (Kepmenhut Nomor : SK.302/Kpts-II/2013 tanggal 1 Mei 2013).

Posisi strategis sumberdaya hutan dalam konteks pembangunan daerah memiliki dua fungsi utama, yaitu peran hutan dalam pembangunan ekonomi terutama terkait dengan penyediaan barang dan jasa yang memberikan kontribusi terhadap pembangunan perekonomian nasional, daerah dan masyarakat. Peran hutan selanjutnya adalah dalam hal pelestarian lingkungan hidup dengan menjaga keseimbangan sistem tata air, tanah dan udara sebagai unsur utama daya dukung lingkungan dalam sistem penyangga kehidupan. Oleh karena itu pembangunan kehutanan kedepan diarahkan kepada pelestarian hutan melalui peningkatan upaya perlindungan hutan, rehabilitasi hutan dan lahan serta pemberdayaan masyarakat sekitar hutan dengan mengoptimalkan

fungsi Kesatuan Pengeloaan Hutan (KPH) sebagai pengelola hutan di tingkat tapak (lahan hutan dengan batas-batas yang jelas).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa dalam pelaksanaan pembangunan, Pemerintah Daerah menyusun dokumen perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek.

Pada tingkat Perangkat Daerah, untuk melaksanakan tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai kewenangan daerah maka disusun dokumen perencanaan lima tahunan rencana strategis (Renstra) yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta memperhatikan tugas pokok dan fungsi.

Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara tahun 2020-2024 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah khususnya di bidang kehutanan. Penyusunan Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024 dan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perencanaan pembangunan Provinsi Maluku Utara lima tahun ke depan, terutama pada pembangunan sektor kehutanan, diarahkan untuk mewujudkan Visi Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024 yakni "Maluku Utara Sejahtera".

Peran Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara dalam mendukung pembangunan daerah dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) adalah pada Misi ke-4 Gubernur yaitu Membangun Perekonomian Daerah Yang Inklusif Dan Berkualitas Dengan Orientasi Pada Nilai Tambah Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan Dengan Tujuan Mewujudkan Perekonomian Berdaya Saing Yang Memberikan Kesejahteraan Bagi Semua Secara Berkelanjutan.

Pembangunan berkelanjutan menjadi dasar bagi perencanaan pembangunan seluruh sektor termasuk kehutanan. Dukungan Dinas Kehutanan terhadap misi ke-4 Gubernur diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor kehutanan yang pada akhirnya dapat memberikan kontribusi pada penyediaan lapangan kerja, kesempatan berusaha dan meningkatkan penerimaan negara maupun daerah dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan.

Sektor kehutanan secara langsung maupun tidak langsung dituntut mampu memberikan dukungan bagi terselenggaranya pembangunan sektor lain seperti pertanian dan pangan, perikanan dan kelautan, pertambangan dan energi, perindustrian, perdagangan, tenaga kerja, keuangan/perbankan, infrastruktur pekerjaan umum, pariwisata, dan lain-lain secara berkelanjutan. Dukungan yang diberikan antara lain berupa penyediaan produk dan jasa ekologi termasuk di dalamnya stabilitas tata lingkungan, perlindungan keanekaragaman hayati, pelestarian dan pemanfaatan plasma nutfah serta pengaturan tata air, udara dan kesuburan tanah. Bentuk dukungan sektor kehutanan dalam pembangunan berkelanjutan ini menunjukkan pentingnya peran kehutanan dalam lingkup regional/lokal, nasional dan global khususnya terkait mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Pembangunan kehutanan di Provinsi Maluku Utara diselenggarakan berdasarkan mandat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pengurusan sumberdaya hutan sebagai satu kesatuan ekosistem perlu memperhatikan dimensi utama dalam penyelenggaraan pengurusan sumberdaya hutan

yakni keberadaan lahan yang diperuntukkan sebagai kawasan dalam luasan yang cukup dan sebaran spasial yang proporsional.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum Renstra OPD Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang Nomor 46 tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
5. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
8. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2002 tentang Dana Reboisasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2007;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 06 tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutans ebagaimana telah di ubah dengan PP Nomor 3 tahun 2008;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 74 tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050 – 5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

20. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara;
21. Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 58 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara;
22. Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Pada Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara;

1.3 Maksud Dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024 ini adalah :

1. Sebagai pedoman bagi Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya menyusun berbagai kebijakan, program dan kegiatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan yang berhubungan dengan proses perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan;
2. Menjadi kerangka dasar bagi Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah;
3. Memudahkan Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun dan menyampaikan laporan kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara atas pelaksanaan program dan kegiatan secara terpadu, terarah, terukur dan bertanggung jawab.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024 adalah :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan dengan memberikan landasan penentuan program dan kegiatan tahunan secara sistematis, berkelanjutan dan akuntabel;
2. Menyusun rencana program dan kegiatan yang berbasis pengendalian, monitoring dan evaluasi yang berorientasi pada hasil dengan indikator terukur yang telah ditetapkan;
3. Menyatukan persepsi, sikap dan pandangan serta komitmen antara pimpinan dan staf dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya melalui perumusan tujuan dan sasaran yang akan dilaksanakan lima tahun ke depan.

1.4 Sistematika Penulisan

Ruang lingkup isi Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.2 Sumber Daya

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SKPD

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

3.3 Telaahan Renstra K/L

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SKPD

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

5.2 Arah Kebijakan

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB. II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEHUTANAN PROVINSI MALUKU UTARA

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara merupakan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang melaksanakan tugas urusan pemerintahan bidang kehutanan. Dinas Kehutanan melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dipimpin oleh Kepala Dinas Provinsi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor: 58 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara, Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara memiliki struktur organisasi yang terdiri atas 1 Sekretaris Dinas, 4 Bidang Teknis, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), selengkapnya dapat dilihat pada bagan struktur organisasi berikut:



Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara.

Tata Kerja Organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Kehutanan

Mempunyai tugas memimpin, merumuskan, membina, mengarahkan, mengkoordinasikan, dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Provinsi Maluku Utara, kebijakan Gubernur, kondisi obyektif dengan berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a) Perumusan kebijakan di Bidang Perencanaan dan Penggunaan Kawasan Hutan, Bidang Pemanfaatan dan Pengolahan Hasil Hutan, Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan dan Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat; pembinaan dan pelaksanaan kegiatan dinas sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan;
- b) Pelaksanaan bimbingan teknis di Bidang Perencanaan dan Penggunaan Kawasan Hutan, Bidang Pemanfaatan dan Pengolahan Hasil Hutan, Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan serta Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- c) Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d) Pengkoordinasian dengan unit kerja terkait di Bidang Kehutanan;
- e) Monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Perencanaan dan Penggunaan Kawasan Hutan, Bidang Pemanfaatan dan Pengolahan Hasil Hutan, Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan serta Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, hubungan masyarakat, dan protokol.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Pengoordinasian pengelolaan pelayanan administrasi umum;
- b. Pengoordinasian pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. Pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan;
- d. Pengoordinasian pengelolaan administrasi perlengkapan;
- e. Pengoordinasian pengelolaan aset dan barang milik negara/ daerah;
- f. Pengoordinasian pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan
- g. masyarakat dan protokol;
- h. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan; dan
- i. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas .

Sekretariat Dinas terdiri atas:

- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian
- b. Subbagian Perencanaan dan Program
- c. Kelompok Jabatan Fungsional

Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang bertanggung jawab kepada Sekretaris dan

mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan, menghimpun, mengelola dan melaksanakan administrasi urusan umum dan ketatausahaan meliputi: pengelolaan urusan kendaraan dinas operasional, peralatan dan perlengkapan ruangan Gedung/kantor, rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, protokol, 6 perjalanan dinas, tata naskah dinas, kepegawaian dan tugas umum lainnya, berdasarkan pedoman/ peraturan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas. Sedangkan fungsi dari Subbagian Umum dan Kepegawaian:

- a. Perumusan rencana kegiatan/ program kerja dan penyiapan bahan
- b. perumusan kebijakan teknis di Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di sekretariat;
- d. Pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- e. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.

Subbagian Perencanaan dan Program dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian dan bertanggung jawab kepada Sekretaris dan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Sub Bagian Perencanaan, dan Program. Sedangkan fungsi dari Subbagian Perencanaan dan Program:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional yang berkaitan dengan Perencanaan dan Program;
- b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di Sekretariat;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Subbagian Perencanaan dan Pelaporan; dan

- d. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.

3. Bidang Perencanaan dan Penggunaan Kawasan Hutan

Dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Perencanaan Kehutanan, Penataan Kawasan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan berdasarkan pedoman dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tercipta kelancaran tugas.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang Perencanaan dan Penggunaan Kawasan Hutan mempunyai fungsi:

- a) Penyusunan kebijakan teknis, perumusan kebijakan operasional di bidang Perencanaan Kehutanan, Penataan Kawasan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan;
- b) Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Perencanaan Kehutanan, Penataan Kawasan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan;
- c) Penyiapan bimbingan teknis di bidang Perencanaan Kehutanan, Penataan Kawasan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan;
- d) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Perencanaan Kehutanan, Penataan Kawasan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan;
- e) Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bidang Perencanaan Dan Penggunaan Kawasan Hutan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

4. Bidang Pemanfaatan dan Pengolahan Hasil Hutan

Dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Usaha Kehutanan, Pengolahan Hasil hutan serta Iuran dan Peredaran Hasil hutan berdasarkan pedoman dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tercipta kelancaran tugas.

Fungsi Bidang Pemanfaatan dan Pengolahan Hasil Hutan, antara lain :

- a) Penyiapkan perumusan kebijakan operasional di bidang Usaha Kehutanan, Pengolahan Hasil Hutan serta Iuran dan Peredaran Hasil Hutan;
- b) Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional penatagunaan kawasan hutan di bidang Usaha Kehutanan, Pengolahan Hutan dan Iuran serta Peredaran Hasil Hutan;
- c) Penyiapan bimbingan teknis di bidang Usaha Kehutanan, Pengolahan Hutan serta Iuran dan Peredaran Hasil Hutan;
- d) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Usaha Kehutanan, Pengolahan Hutan serta Iuran dan Peredaran Hasil Hutan;
- e) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Pemanfaatan Dan Pengolahan Hasil Hutan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

5. Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan

Dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Rehabilitasi, Perbenihan dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS), Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem serta Pengamanan dan

Perlindungan Hutan berdasarkan pedoman dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tercipta kelancaran tugas.

Fungsi dari Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan, antara lain:

- a) Penyiapkan perumusan kebijakan operasional di bidang Rehabilitasi, Perbenihan dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Konservasi Sumber Daya Hutan dan Ekosistem serta Pengamanan dan Perlindungan Hutan;
- b) Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Rehabilitasi, Perbenihan dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dan Pengamanan serta Perlindungan Hutan;
- c) Penyiapan bimbingan teknis di Bidang Rehabilitasi, Perbenihan dan Pengelolaan Daerah Sungai, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Aliran Sungai dan Pengamanan dan Perlindungan Hutan;
- d) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Rehabilitasi, Perbenihan dan; Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dan Pengamanan serta Perlindungan Hutan;
- e) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

6. Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat

Dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Penyuluhan Kehutanan, Perhutanan Sosial dan Bina Kelembagaan Desa Hutan

berdasarkan pedoman dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tercipta kelancaran tugas.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a) Menyiapkan perumusan kebijakan operasional di bidang Penyuluhan Kehutanan, Perhutanan Sosial dan Bina Kelembagaan Desa Hutan;
- b) Menyiapkan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Penyuluhan Kehutanan, Perhutanan Sosial dan Bina Kelembagaan Desa Hutan;
- c) Menyiapkan bimbingan teknis di Bidang Penyuluhan Kehutanan, Perhutanan Sosial dan Bina Kelembagaan Desa Hutan;
- d) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Penyuluhan Kehutanan, Perhutanan Sosial dan Bina Kelembagaan Desa Hutan.
- e) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

7. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)

UPTD KPH Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 44 Tahun 2017, yakni sebanyak 10 UPTD KPH. KPH Dipimpin oleh seorang Kepala KPH yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dinas di bidang pengelolaan hutan dalam wilayah kerja UPTD KPH yang telah ditetapkan :

Kepala KPH membawahi :

- a. Sub Bagian Tata Usaha
- b. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan
- c. Seksi Perlindungan, KSDAE, dan Pemberdayaan Masyarakat

Tabel 1. UPTD KPH Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara

| No | Nama KPH | Lokasi Kantor | Wilaya Kerja (Kab/Kota; Unit) |
|----|-----------------------|---------------|--|
| 1 | KPH Pulau Morotai | Daruba | Kab/Kota : Pulau Morotai Unit : Unit I KPHL Pulau Morotai |
| 2 | KPH Halmahera Utara | Tobelo | Kab/Kota : Halmahera Utara Unit : Unit II KPHL Tiabo |
| 3 | KPH Halmahera Barat | Jailolo | Kab/Kota : Halmahera Barat Unit : Unit III KPHL Sasado Bidadari |
| 4 | KPH Halmahera Timur | Mabapura | Kab/Kota : Halmahera Timur Unit : Unit IV KPHP Watileo, Unit V KPHP Talawi, Unit VIII KPHP Wasile Maba |
| 5 | KPH Halmahera Tengah | Weda | Kab/Kota : Halmahera Tengah, Halmahera Timur Unit : Unit VI KPHL Ake Kobe, Unit VII KPHP Damuli |
| 6 | KPH Tidore Kepulauan | Akelamo | Kab/Kota : Tidore Kepulauan Unit : Unit IX KPHP Oba, Unit 10 KPHP Gunung Sinopa |
| 7 | KPH Ternate - Tidore | Ternate | Kab/Kota : Kota Ternate, Kota Tidore Kepulauan Unit : Unit XI KPHL Ternate - Tidore |
| 8 | KPH Halmahera Selatan | Bacan | Kab/Kota : Halmahera Bacan Unit : Unit XII KPHP Gane, Unit XIII KPHP Pulau Bacan, Unit XIV KPHP Pulau Obi |
| 9 | KPH Kepulauan Sula | Sanana | Kab/Kota : Kepulauan Sula Unit : Unit XV KPHP Wai Todantaha |
| 10 | KPH Pulau Taliabu | Bobong | Kab/Kota Pulau Taliabu Unit : Unit XVI KPHP Wai Samada |

Sumber : Pergub Maluku Utara Nomor 44 Tahun 2017

2.2 Sumber Daya Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara didukung sumber daya yang ada, yang meliputi:

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara sampai dengan Desember 2018, tercatat sebanyak 276 orang. Berdasarkan

jenjang pendidikan, golongan dan usia, komposisi ASN Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2. Jumlah Aparatur berdasarkan pendidikan

| No | Sekretariat/Bidang/Unit | Jml (org) | Jumlah Berdasarkan Pendidikan | | | | | | | Ket |
|----|--|-----------|-------------------------------|----|----|----|------|------|----|-----|
| | | | S3 | S2 | S1 | D3 | SLTA | SLTP | SD | |
| 1 | Kepala Dinas | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| | Pria | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| | Wanita | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | Sekretariat | 19 | - | 1 | 12 | - | 6 | - | - | |
| | Pria | 12 | - | 1 | 6 | - | 5 | - | - | |
| | Wanita | 7 | - | - | 6 | - | 1 | - | - | |
| 3 | Bidang Perencanaan Dan Penggunaan Kawasan Hutan | 16 | - | 1 | 9 | - | 6 | - | - | |
| | Pria | 14 | - | 1 | 8 | - | 5 | - | - | |
| | Wanita | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | |
| 4 | Bidang Pemanfaatan Dan Pengolahan Hasil Hutan | 15 | - | - | 10 | 1 | 4 | - | - | |
| | Pria | 11 | - | - | 7 | - | 4 | - | - | |
| | Wanita | 4 | - | - | 3 | 1 | - | - | - | |
| 5 | Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan | 15 | - | - | 11 | - | 4 | - | - | |
| | Pria | 13 | - | - | 10 | - | 3 | - | - | |
| | Wanita | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | |
| 6 | Bidang Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat | 17 | - | 1 | 13 | - | 3 | - | - | |
| | Pria | 13 | - | - | 10 | - | 3 | - | - | |
| | Wanita | 4 | - | 1 | 3 | - | - | - | - | |
| 7 | KPH Pulau Morotai | 11 | - | - | 7 | 2 | 2 | - | - | |
| | Pria | 8 | - | - | 5 | 1 | 2 | - | - | |
| | Wanita | 3 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | |
| 8 | KPH Halmahera Utara | 13 | - | - | 6 | 2 | 5 | - | - | |
| | Pria | 11 | - | - | 5 | 2 | 4 | - | - | |
| | Wanita | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | |
| 9 | KPH Halmahera Barat | 27 | - | 1 | 12 | - | 14 | - | - | |
| | Pria | 19 | - | 1 | 7 | - | 11 | - | - | |
| | Wanita | 8 | - | - | 5 | - | 3 | - | - | |
| 10 | KPH Halmahera Timur | 19 | - | 1 | 10 | - | 8 | - | - | |
| | Pria | 13 | - | - | 7 | - | 6 | - | - | |
| | Wanita | 6 | - | 1 | 3 | - | 2 | - | - | |
| 11 | KPH Halmahera Tengah | 20 | - | - | 14 | - | 6 | - | - | |
| | Pria | 19 | - | - | 13 | - | 6 | - | - | |
| | Wanita | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 12 | KPH Tidore Kepulauan | 13 | - | - | 11 | - | 2 | - | - | |
| | Pria | 9 | - | - | 7 | - | 2 | - | - | |
| | Wanita | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | |
| 13 | KPH Ternate - Tidore | 23 | - | 2 | 14 | - | 7 | - | - | |
| | Pria | 12 | - | 1 | 6 | - | 5 | - | - | |
| | Wanita | 11 | - | 1 | 8 | - | 2 | - | - | |
| 14 | KPH Halmahera Selatan | 31 | - | - | 16 | - | 12 | 3 | - | |
| | Pria | 21 | - | - | 9 | - | 9 | 3 | - | |
| | Wanita | 10 | - | - | 7 | - | 3 | - | - | |
| 15 | KPH Kepulauan Sula | 28 | - | - | 13 | - | 15 | - | - | |
| | Pria | 21 | - | - | 9 | - | 12 | - | - | |
| | Wanita | 7 | - | - | 4 | - | 3 | - | - | |

| | | | | | | | | | | |
|----|--------------------------|------------|---|----------|------------|----------|-----------|----------|---|--|
| 16 | KPH Pulau Taliabu | 8 | - | - | 4 | - | 4 | - | - | |
| | Pria | 7 | - | - | 4 | - | 3 | - | - | |
| | Wanita | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| | Jumlah ASN Pria | 204 | - | 5 | 113 | 3 | 80 | 3 | - | |
| | Jumlah ASN Wanita | 72 | - | 3 | 49 | 2 | 18 | - | - | |
| | Total | 276 | - | 8 | 162 | 5 | 98 | 3 | - | |

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara (2019)

Tabel 3. Jumlah Aparatur berdasarkan Golongan

| No | Sekretariat/Bidang/Unit | Jml (org) | Jumlah Berdasarkan Golongan | | | | Ket |
|----|--|-----------|-----------------------------|-----|----|---|-----|
| | | | IV | III | II | I | |
| 1 | Kepala Dinas | 1 | 1 | - | - | - | |
| | Pria | 1 | 1 | - | - | - | |
| | Wanita | - | - | - | - | - | |
| 2 | Sekretariat | 19 | 1 | 17 | 1 | - | |
| | Pria | 12 | 1 | 10 | 1 | - | |
| | Wanita | 7 | - | 7 | - | - | |
| 3 | Bidang Perencanaan Dan Penggunaan Kawasan Hutan | 16 | 1 | 14 | 1 | - | |
| | Pria | 14 | 1 | 12 | 1 | - | |
| | Wanita | 2 | - | 2 | - | - | |
| 4 | Bidang Pemanfaatan Dan Pengolahan Hasil Hutan | 15 | - | 15 | - | - | |
| | Pria | 11 | - | 11 | - | - | |
| | Wanita | 4 | - | 4 | - | - | |
| 5 | Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan | 15 | 1 | 14 | - | - | |
| | Pria | 13 | 1 | 12 | - | - | |
| | Wanita | 2 | - | 2 | - | - | |
| 6 | Bidang Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat | 17 | - | - | - | - | |
| | Pria | 13 | - | 12 | 1 | - | |
| | Wanita | 4 | 1 | 3 | - | - | |
| 7 | KPH Pulau Morotai | 11 | - | - | - | - | |
| | Pria | 8 | 1 | 5 | 2 | - | |
| | Wanita | 3 | - | 3 | - | - | |
| 8 | KPH Halmahera Utara | 13 | - | 10 | 3 | - | |
| | Pria | 11 | - | 9 | 2 | - | |
| | Wanita | 2 | - | 1 | 1 | - | |
| 9 | KPH Halmahera Barat | 27 | 2 | 14 | 11 | - | |
| | Pria | 19 | 2 | 8 | 9 | - | |
| | Wanita | 8 | - | 6 | 2 | - | |
| 10 | KPH Halmahera Timur | 19 | 2 | 12 | 5 | - | |
| | Pria | 13 | 2 | 8 | 3 | - | |
| | Wanita | 6 | - | 4 | 2 | - | |
| 11 | KPH Halmahera Tengah | 20 | 1 | 16 | 2 | - | |
| | Pria | 19 | 1 | 16 | 2 | - | |
| | Wanita | 1 | - | 1 | - | - | |
| 12 | KPH Tidore Kepulauan | 13 | 1 | 11 | 1 | - | |
| | Pria | 9 | 1 | 7 | 1 | - | |
| | Wanita | 4 | - | 4 | - | - | |
| 13 | KPH Ternate - Tidore | 23 | 1 | 19 | 3 | - | |
| | Pria | 13 | 1 | 9 | 3 | - | |
| | Wanita | 10 | - | 10 | - | - | |
| 14 | KPH Halmahera Selatan | 31 | - | 19 | 9 | 3 | |
| | Pria | 21 | - | 12 | 6 | 3 | |
| | Wanita | 10 | - | 7 | 3 | - | |
| 15 | KPH Kepulauan Sula | 28 | - | 14 | 14 | - | |
| | Pria | 21 | - | 10 | 11 | - | |

| | | | | | | | |
|----|--------------------------|------------|-----------|------------|-----------|----------|--|
| | Wanita | 7 | - | 4 | 3 | - | |
| 16 | KPH Pulau Taliabu | 8 | - | 5 | 3 | - | |
| | Pria | 7 | - | 5 | 2 | - | |
| | Wanita | 1 | - | - | 1 | - | |
| | Jumlah ASN Pria | 205 | 12 | 146 | 44 | 3 | |
| | Jumlah ASN Wanita | 71 | 1 | 58 | 12 | 0 | |
| | Total | 276 | 13 | 204 | 56 | 3 | |

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Dinas Kehutan Provinsi Maluku Utara (2019)

Tabel 4. Jumlah pegawai berdasarkan golongan dan usia

| Golongan | Usia | | | | Keterangan |
|----------|------------|-----------------|------------|-------|------------|
| | ≤ 35 Tahun | 36 s/d 49 Tahun | ≥ 50 Tahun | Total | |
| Gol. II | 4 | 11 | 3 | 18 | |
| Gol. III | 12 | 45 | 11 | 68 | |
| Gol. IV | - | - | 3 | 3 | |
| Total | 16 | 56 | 17 | 89 | |

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Dinas Kehutan Provinsi Maluku Utara (2019)

Tabel 5. Jumlah pegawai Berdasarkan Jabatan Fungsional Tertentu (JFT)

| No. | Jabatan Fungsional Tertentu | Jumlah | Ket |
|-----|-----------------------------|--------|-----|
| 1 | Penyuluh Kehutanan | 26 | |
| 2 | Polhut | - | |
| 3 | PEH | - | |
| 4 | Pengawas Lingkungan | - | |
| 5 | Survei dan Pemetaan | - | |

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Dinas Kehutan Provinsi Maluku Utara (2019)

2.2.2 Aset Yang Dikelola

Selain Sumber Daya Manusia, untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara juga ditunjang oleh sarana dan prasarana berupa aset yang perlu dikelola dan dipelihara. Sarana dan prasarana tersebut antara lain bangunan kantor, kendaraan dinas/operasional, peralatan dan perlengkapan kantor serta sarana dan prasarana pendukung lainnya. Adapun jenis, jumlah, kondisi, tahun perolehan serta lokasi aset tersebut disajikan pada berikut.

Tabel 6. Rekapitulasi Asset Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara

| No | NamaBarang | Type/Merk | Volume | HargaBarang | Sumber Dana UntukPengadaan | Tahun |
|-----------|----------------------------|----------------|--------|-------------|----------------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. | PERALATAN DAN MESIN | | | | | |
| 1 | Sepeda Motor | Honda Supra | 2 | 34.000.000 | APBD | 2002 |
| 2 | Sepeda Motor | Yamaha / YT | 5 | 100.000.000 | DAK-DR | 2003 |
| 3 | Sepeda Motor | Yamaha Jupiter | 3 | 45.000.000 | DAK-DR | 2003 |
| 4 | Speed Boat | - | 1 | 30.000.000 | DAK-DR | 2003 |
| 5 | Motor Boat | Yamaha | 1 | 15.000.000 | DAK-DR | 2003 |
| 6 | Mesin Ketik Manual Standar | Brother | 2 | 5.000.000 | APBD | 2003 |
| 7 | Kursi Putar | Arinda | 1 | 950.000 | APBD | 2003 |
| 8 | Mobil | - | 1 | 137.550.000 | APBD | 2006 |
| 9 | Sepeda Motor | Honda/Revo | 1 | 16.500.000 | APBD | 2006 |
| 10 | Mobil | - | 1 | 140.000.000 | APBD | 2007 |
| 11 | Meja Komputer | OGGI | 10 | 3.950.000 | APBD | 2007 |
| 12 | PC Unit / Komputer PC | HP | 10 | 149.500.000 | APBD | 2007 |
| 13 | Printer | HP | 10 | 13.000.000 | APBD | 2007 |
| 14 | UPS | Prolink | 10 | 7.500.000 | APBD | 2007 |
| 15 | Meja Pejabat Eselon IV | Solid | 10 | 4.950.000 | APBD | 2007 |
| 16 | Kursi Pejabat Eselon IV | Chytose | 20 | 1.500.000 | APBD | 2007 |
| 17 | Mobil | Pick Up | 1 | 190.000.000 | APBD | 2008 |
| 18 | Filing Besi/Metal | Brother | 10 | 24.840.000 | APBD | 2008 |
| 19 | Kursi Lipat | Olympic | 50 | 15.500.000 | APBD | 2008 |
| 20 | Printer | HP | 2 | 5.580.000 | APBD | 2008 |
| 21 | Scanner | UMAX | 1 | 29.300.000 | APBD | 2008 |
| 22 | UPS | Promatic | 10 | 7.400.000 | APBD | 2008 |
| 23 | Lemari Arsip Dinamis | Olympic | 4 | 6.700.000 | APBD | 2008 |
| 24 | Mobil Pick Up | Pick Up | 1 | 225.000.000 | APBD | 2010 |
| 25 | Filling Bes/Metal | Brother | 4 | 9.936.000 | APBD | 2010 |
| 26 | Lemari Kaca | Expo | 5 | 19.250.000 | APBD | 2010 |
| 27 | Meja Komputer | Crystal | 4 | 7.660.000 | APBD | 2010 |
| 28 | Kursi Kerja | Elviron | 4 | 1.900.000 | APBD | 2010 |
| 29 | Lap Top | HP | 5 | 59.675.000 | APBD | 2010 |

| | | | | | | |
|----|--|---------------------|----|-------------|--------------|------|
| 30 | Printer | HP | 5 | 12.100.000 | APBD | 2010 |
| 31 | Meja Kerja Pejabat Eselon II | Saga | 1 | 4.160.000 | APBD | 2010 |
| 32 | Meja Kerja Pejabat Eselon IV | Saga | 14 | 29.120.000 | APBD | 2010 |
| 33 | Meja Rapat Pejabat Eselon III | - | 1 | 2.550.000 | APBD | 2010 |
| 34 | Meja Kerja Pejabat Eselon III | Grand Furniture | 6 | 21.570.000 | APBD | 2010 |
| 35 | Kursi Kerja Pegawai Non Struktural | Elviron | 26 | 12.350.000 | APBD | 2010 |
| 36 | Kursi Rapat Ruang Rapat Staf | Elviron | 35 | 16.625.000 | APBD | 2010 |
| 37 | Sepeda Motor | - | 1 | 30.200.000 | APBD | 2011 |
| 38 | Sepeda Motor | - | 1 | 14.800.000 | APBD | 2011 |
| 39 | Global Positioning System (GPS) | Garmin | 11 | 47.000.000 | APBD | 2011 |
| 40 | Lap Top | Asus | 4 | 42.000.000 | APBD | 2011 |
| 41 | Printer | HP | 11 | 11.000.000 | APBD | 2011 |
| 42 | Proyektor + Attachment | Epson | 1 | 9.500.000 | APBD | 2011 |
| 43 | Kompas | Sunto | 6 | 12.000.000 | APBD | 2011 |
| 44 | Sepeda Motor | - | 1 | 18.700.000 | APBD | 2012 |
| 45 | Portable Generating Set | Sumo | 1 | 7.485.000 | DAK | 2013 |
| 46 | Mobil Pick Up | Ford/Ranger | 1 | 297.703.550 | DAK | 2013 |
| 47 | Sepeda Motor | Suzuki/Titan CW | 1 | 14.800.000 | APBD | 2013 |
| 48 | Sepeda Motor | Suzuki/Shogun Axelo | 1 | 16.800.000 | APBD | 2013 |
| 49 | Sepeda Motor | Suzuki/Thunder | 2 | 35.120.000 | APBD | 2013 |
| 50 | Mesin Potong Rumput | NSR/Platinum | 2 | 6.974.000 | APBD | 2013 |
| 51 | PC Unit/Komputer PC | Deli | 1 | 14.000.000 | Hibah Dephut | 2013 |
| 52 | Lap Top | Asus | 2 | 15.000.000 | APBD | 2013 |
| 53 | Mobil | Ford/Ranger | 1 | 412.733.000 | APBD | 2014 |
| 54 | Mobil | Toyota/Rush | 1 | 260.800.000 | APBD | 2014 |
| 55 | Sepeda Motor | Honda/CB150R | 6 | 159.600.000 | APBD | 2014 |
| 56 | Sepeda Motor | Honda/Blade 125 | 4 | 72.000.000 | APBD | 2014 |
| 57 | Sepeda Motor | Kawasaki/New | 3 | 111.529.880 | APBD | 2014 |
| 58 | Kendaraan Bermotor Beroda Tiga Lain-lain | Kaisar/Triseda | 2 | 79.500.000 | APBD | 2014 |
| 59 | Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman | - | 2 | 59.600.000 | APBD | 2014 |
| 60 | Aksesories Kendaraan | Ford/Ranger | 1 | 53.000.000 | APBD | 2014 |
| 61 | Aksesories Kendaraan | Toyota/Rush | 1 | 37.050.000 | APBD | 2014 |
| 62 | Camera Film | Nikon/Coolpix | 1 | 24.860.000 | APBD | 2014 |
| 63 | Camera Film | Nikon/D5200 | 1 | 12.265.000 | APBD | 2014 |

| | | | | | | |
|----|--|----------------------|----|-------------|------|------|
| 64 | Camera Film | Sony/HXR-MC150P | 1 | 27.335.000 | APBD | 2014 |
| 65 | Alat Rumah Tangga Lain-lain | Alat Peraga Penyuluh | 1 | 9.900.000 | APBD | 2014 |
| 66 | Alat Pemadam Portable | - | 2 | 33.880.000 | APBD | 2014 |
| 67 | Pompa Kebakaran | - | 3 | 17.985.000 | APBD | 2014 |
| 68 | Lap Top | Sony/Vaio | 5 | 77.550.000 | APBD | 2014 |
| 69 | Lap Top | Apple/Macbook | 1 | 16.720.000 | APBD | 2014 |
| 70 | Lap Top | HP/Envy 17T-J100 | 1 | 19.030.000 | APBD | 2014 |
| 71 | Lap Top | HP/Envy Sleekbook 14 | 1 | 14.600.000 | APBD | 2014 |
| 72 | CPU | ICA/CT 10820 | 9 | 29.895.000 | APBD | 2014 |
| 73 | Alat Komunikasi Radio HF/FM Lain-lain | - | 8 | 11.880.000 | APBD | 2014 |
| 74 | Alat Ukur Lainnya | Yamayo | 10 | 7.590.000 | APBD | 2015 |
| 75 | Meja Rapat | Kayu | 1 | 21.825.000 | APBD | 2015 |
| 76 | Kursi Rapat | Chitose | 10 | 17.750.000 | APBD | 2015 |
| 77 | Daun Pintu Aluminium | Besi | 1 | 4.596.600 | APBD | 2015 |
| 78 | Meubelair Lainnya (Perlengkapan Ruangan Rapat) | - | 1 | 3.432.000 | APBD | 2015 |
| 79 | Meubelair Lainnya (Teralis) | Besi | 30 | 40.263.100 | APBD | 2015 |
| 80 | Gordyn | - | 31 | 26.892.300 | APBD | 2015 |
| 81 | Sound System | Maxx | 1 | 19.723.000 | APBD | 2015 |
| 82 | Mimbar/Podium | Kayu | 1 | 11.902.000 | APBD | 2015 |
| 83 | PC Unit / Komputer PC | HP | 5 | 91.750.000 | APBD | 2015 |
| 84 | Lap Top | Toshiba | 2 | 29.700.000 | APBD | 2015 |
| 85 | Ploter | - | 1 | 99.900.000 | APBD | 2015 |
| 86 | Ploter | HP/Contrex Quattro | 1 | 293.480.000 | APBD | 2015 |
| 87 | Printer | HP | 1 | 18.500.000 | APBD | 2015 |
| 88 | Server | - | 1 | 59.400.000 | APBD | 2015 |
| 89 | Meja Kerja Pejabat Eselon II | Xin Chao | 1 | 3.954.400 | APBD | 2015 |
| 90 | Meja Kerja Pejabat Eselon III | Chitose | 5 | 9.900.000 | APBD | 2015 |
| 91 | Meja Kerja Pegawai Non Struktural | OGGI | 40 | 25.800.000 | APBD | 2015 |
| 92 | Meja Rapat Pejabat Eselon III | OGGI | 24 | 39.837.000 | APBD | 2015 |
| 93 | Kursi Kerja Pejabat Eselon II | Xin Chao | 1 | 4.952.000 | APBD | 2015 |
| 94 | Kursi Kerja Pejabat Eselon III | Chitose | 5 | 9.905.000 | APBD | 2015 |
| 95 | Kursi Kerja Pegawai Non Struktural | Chitose | 30 | 22.614.000 | APBD | 2015 |
| 96 | Kursi Rapat Ruangan Staf | Chitose | 80 | 49.200.000 | APBD | 2015 |
| 97 | Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II | - | 1 | 9.800.000 | APBD | 2015 |

| | | | | | | |
|-----------|--|--|----|---------------|------|------|
| 98 | Kursi Tamu di Ruang Pejabat Eselon III | - | 4 | 26.800.000 | APBD | 2015 |
| 99 | Kursi Tamu di Ruang Tunggu Pejabat Eselon II | - | 3 | 22.875.000 | APBD | 2015 |
| 100 | Alti Meter (Haga) | Germany | 5 | 42.744.000 | APBD | 2015 |
| 101 | Pita Ukuran (Meteran) | Yamayo | 10 | 24.0644.000 | APBD | 2015 |
| 102 | Teropong | - | 1 | 14.500.000 | APBD | 2015 |
| 103 | Station Wagon | Ertiga | 3 | 600.000.000 | APBD | 2016 |
| 104 | Lemari Penyimpanan | Furniture | 1 | 12.320.000 | APBD | 2016 |
| 105 | Kursi Rapat | - | 4 | 13.640.000 | APBD | 2016 |
| 106 | Gordyn | - | | 34.705.000 | APBD | 2016 |
| 107 | Alat Rumah Tangga Lain-lain (Teralis) | - | - | 44.825.000 | APBD | 2016 |
| 108 | PC Unit/Komputer PC | Lenovo | 3 | 59.400.000 | APBD | 2016 |
| 109 | Lap Top | Asus/X450JB | 4 | 44.880.000 | APBD | 2016 |
| 110 | Printer | Epson/L220 | 8 | 29.700.000 | APBD | 2016 |
| 111 | UPS | FSP | 2 | 14.410.000 | APBD | 2016 |
| 112 | Meja Rapat Pejabat Eselon III | - | 1 | 14.850.000 | APBD | 2016 |
| 113 | Proyektor + Attachment | Infocus | 3 | 41.580.000 | APBD | 2016 |
| 114 | Layar Proyektor | - | 3 | 8.910.000 | APBD | 2016 |
| 115 | AC Split | LG | 1 | 7.150.000 | APBD | 2017 |
| 116 | AC Split | LG | 2 | 49.850.000 | APBD | 2017 |
| 117 | Lap Top | HP/HP Notebook 14- bs 129 TX (3PU14PA) | 8 | 64.361.520 | APBD | 2018 |
| 118 | Lap Top | HP/HP Notebook 14- bs 705TU (3MR21PA) | 1 | 5.972.480 | APBD | 2018 |
| 119 | Printer | Epson/L-360 | 4 | 10.662.000 | APBD | 2018 |
| II | GEDUNG DAN BANGUNAN | | | | | |
| 1 | Bangunan Menara Perambuan Lain-lain | | 1 | 65.000.000 | APBD | 2006 |
| 2 | Konstruksi Pagar (Pagar Kantor KPH Gunung Sinopa) | | 1 | 102.619.000 | APBD | 2013 |
| 3 | Rumah Negara GolonnganI Type C Permanen (Mess KPH Gunung Sinopa) | | 1 | 188.269.000 | APBD | 2013 |
| 4 | Rambu Papan Tambahan (KPH Gunung Sinopa) | | 1 | 5.950.000 | APBD | 2013 |
| 5 | Bangunan Gedung Kantor Permanen (Pos Pengamanan KPH) | | 1 | 34.831.000 | APBD | 2013 |
| 6 | Bangunan Gedung Kantor Permanen (Kantor Dinas Kehutanan Prov. Malut Tahap I) | | 1 | 2.790.536.000 | APBD | 2013 |
| 7 | Bangunan Gedung Kantor Permanen (Kantor Dinas Kehutanan Prov. Malut Tahap II) | | 1 | 3.858.391.000 | APBD | 2014 |
| 8 | Gedung Garasi/Pool Permanen (Garasi Kantro Dinas Kehutanan Prov. Malut) | | 1 | 239.145.000 | APBD | 2017 |

| | | | | | | |
|----|---|--|---|-------------|------|------|
| 9 | Konstruksi Pagar (Pagar Kantor Dinas Kehutanan Prov. Malut) | | 1 | 269.111.820 | APBD | 2017 |
| 10 | Bangunan Gedung Kantor Permanen (Kantor Resort KPH Pulau Taliabu) | | 1 | 392.790.600 | DAK | 2018 |
| 12 | Bangunan Gedung Kantor Permanen (Kantor Resort KPH Kota Tidore Kepulauan) | | 1 | 390.907.110 | DAK | 2018 |
| 13 | Bangunan Gedung Kantor Permanen (Kantor Resort KPH Halmahera Tengah) | | 1 | 390.759.930 | DAK | 2018 |
| 14 | Bangunan Gedung Kantor Permanen (Kantor Resort KPH Kepulauan Sula) | | 1 | 390.093.750 | DAK | 2018 |

Sumber: Sub Bagian Keuangan dan BMD, Dinas Kehutan Provinsi Maluku Utara (2019)

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara

Selama kurun waktu 2015-2019 Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara telah menyelenggarakan pelayanan publik di bidang Kehutanan secara umum sesuai tugas pokok dan fungsi. Pelayanan tersebut didukung oleh peran aktif aparatur kehutanan untuk pencapaian dan perwujudan pembangunan yang berkualitas dan berhasil guna.

Adapun pencapaian kinerja OPD Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara dan anggaran serta realisasi pendanaan pelayanan perangkat daerah dapat dilihat pada Tabe berikut.

Tabel 7. Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara Tahun 2015-2019

| No | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke- | | | | | Realisasi Capaian Tahun ke- | | | | | Rasio Capaian pada Tahun ke- | | | | |
|-----|--|-------------|------------|--------------------------|---|-------|-------|------|------|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|------------------------------|------|------|------|-------|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 1 | Persentase peningkatan jumlah unit pengelolaan hutan tingkat tapak yang operasional | - | - | - | 12,5 | 18,75 | 31,25 | 62,5 | 100 | 12,5 | 12,5 | 25,0 | 37,5 | 68,75 | 100 | 67 | 80 | 60 | 68,75 |
| 2 | Persentase peningkatan realisasi produksi hasil hutan kayu terhadap jatah tebangan tahunan (JPT) | - | - | - | 32,5 | 35 | 40 | 45 | 50 | 40,02 | 15,58 | 29,73 | 33,87 | 35,21 | 123 | 45 | 74 | 75 | 70,43 |
| 3 | Persentase peningkatan partisipasi kelompok tani hutan (KTH) dalam pengelolaan hutan | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3,75 | 8,28 | 13 | 100 | 100 | 375 | 414 | 1300 |
| | Jumlah lokasi pengelolaan wisata alam | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | 100 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--------|-------|-----|-----|------|------|------|
| 4 | Persentase penurunan tingkat pencurian hasil hutan kayu dari dalam kawasan hutan | - | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 31 | 11,13 | 259,72 | 60,98 | 100 | 620 | 223 | 5194 | 1200 |
| 5 | Luasan Lahan Kritis yang di rehabilitasi di luar kawasan hutan | - | - | - | 620 | 200 | 200 | 200 | 200 | 620 | 201 | 450 | 260 | 100 | 100 | 101 | 225 | 130 | 140 |
| 6 | Luasan Lahan Kritis yang di rehabilitasi di dalam kawasan hutan | - | - | - | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 218 | 1050 | 140 | 0 | 100 | 545 | 2625 | 350 | 0 |

Tabel 8. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara

| Uraian | Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- | | | | |
|------------------|-------------------------|---------------|----------------|----------------|-----|-----------------------------------|---------------|----------------|----------------|------|---|--------|--------|--------|------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
| Belanja langsung | 15.095.687.300 | 8.427.231.350 | 23.792.400.000 | 19.956.597.417 | | 10.358.844.400 | 8.139.324.250 | 11.874.872.780 | 17.584.569.090 | | 68,62% | 96,58% | 49,91% | 88,11% | |

Pada tabel di atas dapat dilihat berbagai capaian Indikator Kinerja Utama yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara dalam mengemban tugas dan fungsi serta pelayanan pada kurun waktu 2014-2018.

Salah satu capaian Indikator Kinerja Utama pada Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara pada kurun 2014-2018 adalah penanganan lahan kritis di dalam kawasan hutan yang sampai dengan tahun 2018 telah merealisasikan kegiatan rehabilitasi hutan seluas 1.448 ha dan telah melampaui target luasan selama lima tahun seluas 200 ha. Demikian juga dengan penanganan lahan kritis di luar kawasan hutan, realisasi penghijauan sampai dengan tahun 2018 seluas 1.531 ha dan telah melampaui target lima tahun seluas 1.420 ha. Salah satu faktor pendukung capaian kinerja penanganan lahan kritis adalah penggunaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi (DBH DR) untuk membiayai kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan sejak tahun 2017.

2.4 Kondisi Umum Pembangunan Kehutanan

2.4.1. Gambaran Umum Wilayah Provinsi Maluku Utara

Maluku Utara merupakan daerah yang berciri kepulauan dengan jumlah 1.474 pulau besar dan kecil dimana sekitar 89 pulau telah dihuni dan 1.385 pulau belum berpenghuni. Provinsi Maluku Utara beribukota di Sofifi dengan 8 kabupaten dan 2 kota, 115 kecamatan, 117 kelurahan dan 1.063 desa. Jumlah penduduk sampai dengan akhir tahun 2019 sebanyak 2.255.771 jiwa

Luas wilayah Provinsi Maluku Utara meliputi 145.779,03 km² yang terdiri dari luas wilayah lautan 113.796,53 km² atau 69,08% dan luas wilayah daratan 31.982,50 km² atau 30,92 %.

Luas wilayah Provinsi Maluku Utara berdasarkan Kabupaten Kota dijabarkan dalam Tabel berikut ini.

Tabel 9. Luas Wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara

| Provinsi, Kabupaten / Kota | Luas Wilayah (Km ²) | | Jumlah |
|------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| | Darat | Laut | |
| Provinsi Maluku Utara | 31.982,50 | 113.796,53 | 145.779,03 |
| Kabupaten Halmahera Barat | 1.704,20 | 11.623,42 | 13.327,62 |
| Kabupaten Halmahera Tengah | 2.653,76 | 6.104,65 | 8.758,41 |
| Kabupaten Kepulauan Sula | 3.304,32 | 6.647,17 | 9.951,49 |
| Kabupaten Halmahera Selatan | 8.148,90 | 31.484,40 | 39.633,30 |
| Kabupaten Halmahera Utara | 3.896,90 | 19.536,02 | 23.432,92 |
| Kabupaten Halmahera Timur | 6.571,37 | 7.695,82 | 14.267,19 |
| Kabupaten Pulau Morotai | 2.476,00 | 13.170,01 | 15.646,01 |
| Kabupaten Pulau Taliabu | 1.469,98 | 7.697,29 | 9.167,27 |
| Kota Ternate | 111,39 | 5.544,55 | 5.655,94 |
| Kota Tidore Kepulauan | 1.645,73 | 4.293,20 | 5.938,93 |

Sumber : RPJMD Provinsi Maluku Utara 2020-2024

2.4.2. Kawasan Hutan

Luas Kawasan Hutan Provinsi Maluku Utara berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 302/Menhut-II/2013 adalah 2.511.781 ha. Berdasarkan fungsi kawasan hutan Provinsi Maluku Utara terdiri dari Hutan Konservasi (HK) seluas ± 219.012 Ha, Hutan Lindung (HL) seluas ± 578.998 ha, Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas ± 675.732 ha, Hutan Produksi tetap (HP) seluas ± 485.323 Ha, serta Hutan Produksi Konversi (HPK) seluas ± 552.716 ha. Disamping itu, di luar kawasan hutan terdapat Areal Penggunaan Lain (APL) seluas ± 642.572 ha.

Sesuai kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pengelolaan Kawasan Hutan Konservasi (HK) berupa Taman Nasional Aketajawe dan Lolobata serta beberapa Cagar Alam menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Sedangkan pengelolaan Hutan Lindung (HL) dan Hutan Produksi (HP, HPT dan HPK) selain kegiatan Rehabilitasi Hutan menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.

Rincian Luas Kawasan Hutan Provinsi Maluku Utara per Kabupaten/Kota dijabarkan pada tabel berikut :

Tabel 10. Luas Kawasan Hutan Provinsi Maluku Utara per Kabupaten Kota

| No | Kab/Kota | Kawasan Hutan | | | | | Jumlah | Bukan Kawasan |
|----|------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|
| | | HSA | HL | HPT | HP | HPK | | APL |
| 1 | Kab. Halmahera Barat | 75,27 | 72.929,15 | 23.229,02 | 2.726,45 | 56.079,44 | 155.039,33 | 71.327,59 |
| 2 | Kab. Halmahera Tengah | 16.071,27 | 33.735,65 | 63.285,27 | 27.090,52 | 42.907,70 | 183.090,41 | 46.407,01 |
| 3 | Kab. Kepulauan Sula | 2.101,20 | 29.927,06 | 35.403,94 | 32.089,26 | 36.841,06 | 136.362,52 | 42.460,89 |
| 4 | Kab. Halmahera Selatan | 42.348,50 | 131.425,55 | 178.688,53 | 187.394,73 | 127.747,93 | 667.605,24 | 143.402,97 |
| 5 | Kab. Halmahera Utara | - | 79.181,73 | 70.084,91 | 22.026,51 | 77.210,30 | 248.503,45 | 90.422,50 |
| 6 | Kab. Halmahera Timur | 94.388,56 | 88.559,55 | 208.558,96 | 77.186,84 | 67.745,14 | 536.439,05 | 111.066,21 |
| 7 | Kab. Pulau Morotai | - | 93.232,52 | 56.481,04 | - | 42.810,77 | 192.524,33 | 42.122,91 |
| 8 | Kab. Pulau Taliabu | 11.105,11 | 22.102,42 | 10.513,29 | 136.275,83 | 64.369,90 | 244.366,55 | 56.281,23 |
| 9 | Kota Ternate | - | 4.403,83 | - | 522,57 | 5.424,23 | 10.350,63 | 6.067,46 |
| 10 | Kota Tidore Kepulauan | 52.922,53 | 23.500,74 | 29.486,98 | 9,91 | 31.579,05 | 137.499,21 | 33.012,89 |
| | Jumlah | 219.012 | 578.998 | 675.732 | 485.323 | 552.716 | 2.511.781 | 642.572 |

Sumber : Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.302/Menhut-II/2013 tanggal 1 Mei 2013.

2.4.3. Penggunaan Kawasan Hutan

Penggunaan kawasan hutan adalah penggunaan atas sebagian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan tersebut. Kegiatan pembangunan dimaksud adalah untuk kegiatan pertambangan, pembangunan jalan, jaringan listrik dan sebagainya. Jumlah izin penggunaan kawasan hutan/Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) di Provinsi Maluku Utara sampai dengan tahun 2019 terdapat sebanyak 52 Izin dengan total luas 39.039,97 Ha.

Sebaran Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) di kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Maluku Utara disajikan pada tabel berikut :

Tabel 11. Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) Provinsi Maluku Utara

| No | Kab/Kota | IPPKH Izin Produksi | | IPPKH Izin Eksplorasi | | TOTAL | | Ket |
|----|-----------------------|---------------------|----------|-----------------------|------|--------|----------|-----|
| | | Jumlah | Luas | Jumlah | Luas | Jumlah | Luas | |
| 1 | Kab. Halmahera Barat | 1 | 240,2 | - | - | 1 | 240,20 | |
| 2 | Kab. Halmahera Tengah | 13 | 5.463,86 | - | - | 13 | 5.463,86 | |
| 3 | Kab. Kepulauan Sula | 2 | 278,54 | - | - | 2 | 278,54 | |

| | | | | | | | |
|----|------------------------|-----------|---------------|----------|---------------|-----------|------------------|
| 4 | Kab. Halmahera Selatan | 7 | 5.377,50 | - | - | 7 | 5.377,50 |
| 5 | Kab. Halmahera Utara | 4 | 3.409,48 | 2 | 14.030,98 | 6 | 17.440,46 |
| 6 | Kab. Halmahera Timur | 10 | 4.650,42 | 1 | 938,09 | 11 | 5.588,51 |
| 7 | Kab. Pulau Morotai | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Kab. Pulau Taliabu | 11 | 4.636,04 | - | - | 11 | 4.636,04 |
| 9 | Kota Ternate | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Kota Tidore Kepulauan | 1 | 14,86 | - | - | 1 | 14,86 |
| | Jumlah | 49 | 24.071 | 3 | 14.969 | 52 | 39.039,97 |

Sumber : Seksi Penggunaan Kawasan Hutan (2019)

2.4.4. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)

Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) adalah Izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam hutan alam pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan dan pemasaran. Bentuk izin usaha terdiri dari Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-HA) dan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT).

Jumlah IUPHHK-HA sampai dengan tahun 2019 adalah 15 Izin dengan luas 782.006 ha dan IUPHHK-HT sebanyak 5 Izin dengan luas 65.908 ha. Kondisi IUPHHK di Provinsi Maluku Utara saat ini sebagian besar tidak aktif karena berbagai faktor seperti potensi Hasil Hutan Kayu yang semakin berkurang, masalah pembiayaan dan lain-lain.

Data Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) di Provinsi Maluku Utara ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel 12. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)

| NO | NAMA IZIN | LUAS | KABUPATEN | KET. |
|----------|-------------------------|----------------|-------------------|-------|
| A | IUPHHK-HA | 782.006 | | |
| 1 | PT. Bela Berkah Anugrah | 33.880 | Halmahera Selatan | aktif |

| | | | | |
|----------|---------------------------------|---------------|-------------------|--------------------------|
| 2 | PT. Mohtra Agung Persada | 50.940 | Halteng-Haltim | aktif |
| 3 | PT. Nusa Niwe Indah | 73.500 | Halbar-Halut | tidak aktif |
| 4 | PT. Poleko Yubarsons | 86.599 | Halmahera Selatan | aktif |
| 5 | PT. Surya Kirana Dutamas | 66.230 | Halmahera Selatan | aktif |
| 6 | PT. TAIWI Unit I | 73.375 | Halmahera Timur | tidak aktif/proses aktif |
| 7 | PT. Telaga Bhakti Persada | 63.405 | Halmahera Selatan | aktif |
| 8 | PT. Tunas Pusaka Mandiri | 24.430 | Halmahera Utara | tidak aktif |
| 9 | PT. Wana Kencana Sejati Unit II | 45.825 | Halmahera Timur | tidak aktif/proses aktif |
| 10 | PT. Wana Kencana Sejati | 47.410 | Halmahera Timur | aktif |
| 11 | PT. Citra Niaga Nusantara | 46.065 | Morotai | Tahap persiapan |
| 12 | PT. Wijaya Kencana Indonesia | 38.695 | Halmahera Selatan | aktif |
| 13 | PT. Nusa Pala Nirwana | 28.892 | Halmahera Selatan | tidak aktif |
| 14 | PT. Mahakarya Agra Pesona | 36.860 | Halmahera Timur | aktif |
| 15 | PT. Taliabu Godo Maogena | 65.900 | P. Taliabu | Tahap persiapan |
| B | IUPHHK-HTI | 65,908 | | |
| 1 | PT. Kirana Cakrawala | 21.265 | Halmahera Timur | tidak aktif/proses aktif |
| 2 | PT. NNE Plantations. | 6.770 | Halmahera Timur | tidak aktif |
| 3 | PT. Mangole Timber Producers | 14.851 | Kep. Sula | tidak aktif/proses aktif |
| 4 | PT. Kalpika Wanatama Unit I | 11.780 | P. Taliabu | tidak aktif/proses aktif |
| 5 | PT. Kalpika Wanatama Unit II | 11.242 | Kep. Sula | tidak aktif/proses aktif |

Sumber : Seksi Perencanaan Hutan (2019)

2.4.5. Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 73/Menhut-II/2010 tanggal 8 Februari 2010 telah ditetapkan wilayah kelola hutan lindung dan hutan produksi sebanyak 16 unit KPH di Maluku Utara dengan luas seluruhnya \pm 1.768.424 ha. Penetapan 16 Unit KPH terdiri dari 5 unit KPH dengan fungsi lindung (KPHL) dan 11 unit KPH fungsi produksi (KPHP).

Sebagai langkah operasionaisasi 16 Unit KPH, maka Pemerintah Daerah membentuk kelembagaan dan organisasi KPH. Kelembagaan KPH di Provinsi Maluku Utara ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 44 Tahun 2017 dengan membentuk 10 Kelembagaan

KPH dalam bentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pada Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara sebagai wasah dari penetapan 16 Unit KPH. Sampai dengan akhir tahun 2019 peran KPH sebagai pengelola hutan di tingkat tapak belum berjalan secara optimal. Beberapa hal yang menghambat operasionalisasi KPH setelah pembentukan kelembagaan antara lain adalah belum tersusunnya dokumen Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP), keterbatasan sarana dan prasarana, keterbatasan personel fungsional tertentu (Penyuluh, Polhut, PEH) serta keterbatasan Anggaran.

UPTD KPH yang telah menyusun dokumen RPHJP di sajikan pada tabel berikut:

Tabel 13. Dokumen RPHJP KPH

| No | KPH/UNIT | RPHJP |
|----|----------------------------------|--------------|
| 1 | KPH Pulau Morotai | |
| | a. Unit I KPHL Pulau Morotai | Ada/disahkan |
| 2 | KPH Halmahera Utara | |
| | a. Unit II KPHL Tiabo | Ada/disahkan |
| 3 | KPH Halmahera Barat | |
| | a. Unit III KPHL Sasado Bidadari | Ada/disahkan |
| 4 | KPH Halmahera Timur | |
| | a. Unit IV KPHP Watileo | Ada/disahkan |
| | b. Unit V KPHP Talawi | Ada/disahkan |
| | c. Unit VIII KPHP Wasile Maba | Ada/disahkan |
| 5 | KPH Halmahera Tengah | |
| | Unit VI KPHL Ake Kobe | Ada/disahkan |
| | Unit VII KPHP Damuli | Ada/disahkan |
| 6 | KPH Tidore Kepulauan | |
| | a. Unit IX KPHP Oba | Ada/disahkan |
| | b. Unit 10 KPHP Gunung Sinopa | Ad/disahkan |
| 7 | KPH Ternate - Tidore | |
| | a. Unit XI KPHL Ternate - Tidore | Ada/disahkan |
| 8 | KPH Halmahera Selatan | |
| | a. Unit XII KPHP Gane | Ada/disahkan |

| | | |
|----|-------------------------------|-------------------|
| | b. Unit XIII KPHP Pulau Bacan | Ada/disahkan |
| | c. Unit XIV KPHP Pulau Obi | Proses pengesahan |
| 9 | KPH Kepualau Sula | |
| | a. Unit XV KPHP Wai Todantaha | Ada/disahkan |
| 10 | KPH Pulau Taliabu | |
| | Unit XVI KPHP Wai Samada | Ada/disahkan |

Sumber: Seksi Perencanaan Hutan (2019)

2.4.6. Lahan Kritis

Lahan kritis adalah lahan di dalam maupun di luar kawasan hutan yang telah mengalami kerusakan, sehingga kehilangan atau berkurang fungsinya sampai pada batas yang ditentukan atau diharapkan. Untuk dapat mengembalikan fungsi lahan kritis maka perlu dilakukan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan baik secara vegetatif (penanaman) maupun sipil teknis (bangunan konservasi tanah dan air).

Rincian luas lahan kritis Provinsi Maluku Utara sebagai berikut :

Tabel 14. Luas lahan Kritis Provinsi Maluku Utara tahun 2018

| No | Kabupaten / Kota | Luas Lahan (Ha) | | | | |
|----|------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
| | | Agak Kritis | Kritis | Potensial Kritis | Sangat Kritis | Tidak Kritis |
| 1 | Kab. Halmahera Barat | 103.128 | 30.190 | 40.753 | 25.803 | 26.598 |
| 2 | Kab. Halmahera Selatan | 465.383 | 67.832 | 136.860 | 23.433 | 116.968 |
| 3 | Kab. Halmahera Tengah | 115.142 | 23.101 | 41.096 | 6.926 | 39.980 |
| 4 | Kab. Halmahera Timur | 412.515 | 39.210 | 89.136 | 14.756 | 92.341 |
| 5 | Kab. Halmahera Utara | 152.238 | 51.627 | 71.667 | 12.449 | 51.323 |
| 6 | Kab. Kepulauan Sula | 106.093 | 19.391 | 35.796 | 2.941 | 13.921 |
| 7 | Kab. Pulau Morotai | 159.048 | 18.493 | 37.946 | 10.019 | 9.688 |
| 8 | Kab. Pulau Taliabu | 160.790 | 12.822 | 62.802 | 216 | 62.167 |
| 9 | Kota Ternate | 6.947 | 2.653 | 867 | 4.169 | 1.728 |
| 10 | Kota Tidore Kepulauan | 116.027 | 13.034 | 18.354 | 8.823 | 14.317 |
| | Total | 1.797.313 | 278.354 | 535.276 | 109.534 | 429.029 |

Sumber : BPDASHL Ake Malamo (2018)

2.4.7. Rehabilitasi, Kerusakan Hutan dan Tutupan Lahan

Upaya Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara dalam mengurangi lahan kritis adalah dengan melakukan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan pada tiap tahun anggaran, namun disisi lain laju kerusakan hutan

(deforestasi) baik akibat faktor alam dan aktifitas manusia yang legal maupun illegal terus terjadi.

Kemampuan hutan untuk memulihkan diri melalui suksesi alam dipandang tidak mampu mengatasi laju degradasi dan deforestasi yang lebih cepat. Oleh karena itu diperlukan campur tangan manusia melalui kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan.

Rincian kegiatan rehabilitasi hutan dan data kerusakan hutan dapat dilihat dalam table berikut :

Tabel 15. Rehabilitasi dan Kerusakan Hutan 2013 - 2019

| No. | Uraian | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----|--|-------|-------|--------|-------|--------|------|------|
| 1 | Rehabilitasi hutan dan lahan kritis | 460 | 329 | 750 | 200 | 1.500 | 400 | 280 |
| 2 | Kerusakan Kawasan Hutan | | | | | | | |
| 2.1 | Kerusakan Kawasan Hutan (Deforestasi) (Ha) | 3.410 | 168 | 10.322 | 9.105 | 43.700 | - | - |
| 2.2 | Kerusakan di Luar Kawasan Hutan (Degradasi) (Ha) | 2.273 | 1.401 | 1.630 | 2.654 | 6.197 | - | - |

Sumber : Seksi Rehabilitasi, Perbenihan dan Pengelolaan DAS (2019)

Kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan sebagai langkah untuk mengatasi permasalahan lahan kritis akibat kerusakan hutan yang terjadi merupakan faktor penentu bagi kualitas tutupan lahan yang bervegetasi pohon.

Tutupan lahan adalah tutupan biofisik pada permukaan bumi yang dapat diamati dan merupakan hasil pengaturan, aktivitas dan perlakuan manusia yang dilakukan pada jenis penutup lahan tertentu untuk melakukan kegiatan produksi, perubahan ataupun perawatan pada areal tersebut. Tutupan biofisik dapat berupa vegetasi (rumput, semak, belukar, pohon), badan air (sungai, danau), tanah kosong, jalan dan sebagainya.

Rasio tutupan lahan berhutan Provinsi Maluku Utara tahun 2018 adalah sebesar 63,80%, hal ini menjelaskan bahwa tutupan lahan bervegetasi pohon baik pada kawasan hutan maupun luar kawasan hutan masih cukup baik. Kondisi tutupan lahan Provinsi Maluku Utara dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 16. Tutupan Lahan Provinsi Maluku Utara tahun 2018

| No. | Kelas Tutupan Lahan | HSA | HL | HPT | HP | HPK | Jumlah Kawasan Hutan | APL | TOTAL |
|-----|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|------------------|
| 1. | Hutan Lahan Kering Primer | 62.955 | 121.182 | 101.619 | 28.417 | 12.859 | 327.031 | 1.175 | 328.206 |
| 2. | Hutan Lahan Kering Sekunder | 141.317 | 340.504 | 450.909 | 300.483 | 268.973 | 1.502.185 | 95.344 | 1.597.530 |
| 3. | Hutan Mangrove Primer | 1 | 25.582 | 313 | 1.254 | 1.918 | 29.068 | 15.619 | 44.687 |
| 4. | Hutan Mangrove Sekunder/Bekas Tebangan | - | 483 | 10 | 36 | 22 | 551 | 329 | 881 |
| 5. | Hutan Rawa Primer | - | - | - | - | 4 | 4 | 3 | 7 |
| 6. | Hutan Rawa Sekunder / Bekas Tebangan | - | 32 | - | 3.284 | 551 | 3.866 | 811 | 4.677 |
| 7. | Hutan Tanaman | - | 261 | 4.240 | 30.400 | 1.658 | 36.559 | 33 | 36.593 |
| A. | Jumlah Berhutan | 204.273 | 488.043 | 557.090 | 363.875 | 285.985 | 1.899.265 | 113.315 | 2.012.580 |
| 8. | Bandara / Pelabuhan | - | - | 10 | - | - | 10 | 381 | 391 |
| 9. | Lahan Terbuka | 1.663 | 4.791 | 7.996 | 1.683 | 2.656 | 18.789 | 6.610 | 25.399 |
| 10. | Pemukiman | - | 119 | 70 | 10 | 132 | 332 | 17.762 | 18.094 |
| 11. | Perkebunan/Kebun | - | - | 363 | 53 | 271 | 687 | 4.032 | 4.719 |
| 12. | Pertambangan | - | 270 | 601 | 832 | 988 | 2.691 | 1.246 | 3.936 |
| 13. | Pertanian Lahan Kering | 1.864 | 1.719 | 6.932 | 5.974 | 18.857 | 35.347 | 105.082 | 140.428 |
| 14. | Pertanian Lahan Kering Campur Semak | 2.840 | 35.989 | 45.088 | 51.401 | 147.102 | 282.419 | 323.458 | 605.877 |
| 15. | Rawa | - | - | - | - | 1 | 1 | 95 | 96 |
| 16. | Sawah | 5 | - | 54 | 67 | 14 | 141 | 8.650 | 8.791 |
| 17. | Semak Belukar | 8.367 | 47.826 | 57.484 | 60.126 | 96.255 | 270.059 | 59.069 | 329.128 |
| 18. | Semak Belukar Rawa | - | 67 | - | 22 | 41 | 130 | 128 | 258 |
| 19. | Savanna / Padang rumput | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
| 20. | Tambak | - | - | - | - | - | - | 36 | 36 |
| 21. | Transmigrasi | - | - | - | - | 30 | 50 | 1.108 | 1.138 |
| 22. | Tubuh Air | - | 173 | 44 | 1.278 | 384 | 1.879 | 1.600 | 3.479 |
| 23. | Awan | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B. | Jumlah Tidak Berhutan | 14.739 | 90.955 | 118.642 | 121.448 | 266.731 | 612.515 | 529.256 | 1.141.772 |
| | Total (A + B) | 219.012 | 578.998 | 675.732 | 485.323 | 552.716 | 2.511.780 | 642.571 | 3.154.351 |

Sumber : Seksi Penataan Kawasan Hutan (2019)

Tutupan lahan beberapa tahun terakhir di Provinsi Maluku Utara menunjukkan kecenderungan menurun. Hal ini disebabkan alih fungsi lahan berhutan untuk perkebunan, pertambangan, pemukiman, pertanian dan lain-lain.

Kondisi tutupan lahan Provinsi Maluku Utara untuk periode 2013-2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 17. Tutupan Lahan Provinsi Maluku Utara 2013-2018

| No. | Berhutan | Tidak Berhutan | Jumlah | % Berhutan |
|------|-----------|----------------|-----------|------------|
| 2013 | 2.060.731 | 1.093.647 | 3.154.378 | 65,33% |
| 2014 | 2.059.373 | 1.095.006 | 3.154.378 | 65,29% |
| 2015 | 2.045.213 | 1.109.165 | 3.154.378 | 64,84% |
| 2016 | 2.033.454 | 1.120.924 | 3.154.378 | 64,46% |
| 2017 | 1.983.530 | 1.170.821 | 3.154.351 | 62,88% |
| 2018 | 2.012.580 | 1.141.772 | 3.154.351 | 63,80% |

2.4.8. Produksi Kayu

Hasil hutan kayu merupakan salah satu sumber daya hutan yang sampai saat ini masih dimanfaatkan dan diusahakan oleh pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu maupun izin pemungutan kayu. Hasil hutan kayu bulat yang diproduksi dari hutan alam, hutan tanaman maupun areal penggunaan lain banyak dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku bagi industri pengolahan kayu baik di dalam maupun luar wilayah Maluku Utara.

Produksi hasil hutan kayu memberikan kontribusi yang cukup besar bagi negara melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sumber daya alam kehutanan yang dapat digunakan untuk pembiayaan pembangunan nasional dan daerah.

Produksi kayu Provinsi Maluku Utara periode 2013-2019 berdasarkan kelompok jenis ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel 18. Produksi Kayu Maluku Utara 2013-2019

| No | Tahun | Produksi Per Kelompok Jenis (m3) | | | | | Jumlah |
|----|-------|----------------------------------|----------------|------------|-------|--------------------|------------|
| | | Meranti | Rimba Campuran | Kayu Indah | Eboni | Kel. Jenis Lainnya | |
| 1 | 2013 | 43.309,47 | 46.826,72 | 201,03 | - | - | 90.337,22 |
| 2 | 2014 | 19.631,71 | 10.247,64 | - | - | - | 29.879,35 |
| 3 | 2015 | 36.289,72 | 10.339,21 | 46,48 | - | - | 46.675,41 |
| 4 | 2016 | 94.650,20 | 58.661,01 | 621,85 | 27,01 | 2.409,36 | 153.933,06 |
| 5 | 2017 | 109.587,07 | 39.156,00 | 387,81 | 58,48 | 724,79 | 149.130,88 |
| 6 | 2018 | 92.383,67 | 44.980,19 | 1.735,82 | 45,46 | 1.917,19 | 139.099,68 |
| 7 | 2019 | 99.689,04 | 66.301,91 | 501,33 | 13,44 | 3.303,14 | 169.817,86 |

Sumber : Seksi Pengolahan Hasil Hutan (2019)

2.4.9. PNBP Sektor Kehutanan

Kontribusi sektor kehutanan dalam mendukung pembangunan nasional masih cukup besar walaupun kecenderungannya terus menurun. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk mengusung pembangunan berkelanjutan dimana pembangunan ekonomi harus selaras dengan pembangunan sosial dan ekologi. Langkah yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan salah satunya adalah dengan menunda pemberian izin baru untuk pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam. Namun di sisi lain permintaan kayu untuk kebutuhan bahan baku industri tidak bisa dihindari, oleh karena itu pemerintah berupaya mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor kehutanan dengan berbagai cara antara lain dengan memperbaiki tata kelola peredaran hasil hutan.

Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor kehutanan khususnya dari pemanfaatan hasil hutan kayu terdiri dari Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR). PSDH adalah pungutan sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil hutan yang dipungut dari hutan negara

dan atau terhadap hasil hutan yang berada pada kawasan hutan yang telah dilepas statusnya menjadi bukan kawasan hutan dan atau hutan negara yang dicadangkan untuk pembangunan diluar sektor kehutanan sedang DR adalah adalah dana untuk reboisasi dan rehabilitasi hutan serta kegiatan pendukungnya yang dipungut dari Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan dari hutan alam berupa kayu.

Rincian PNBP PSDH dan DR Provinsi Maluku Utara tahun 2013-2018 ditampilkan pada table dibawah ini:

Tabel 19. Daftar PNBP PSDH dan DR TAHUN 2013-2018

| NO. | TAHUN | PNBP-PSDH | PNBP-DR | JUMLAH |
|-----|---------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | 2014 | 12.617.438.568 | 41.881.862.602 | 54.499.301.170 |
| 2 | 2015 | 15.508.376.492 | 48.739.965.434 | 64.248.341.926 |
| 3 | 2016 | 11.714.352.416 | 42.562.257.826 | 54.276.610.242 |
| 4 | 2017 | 11.176.154.079 | 33.990.457.342 | 45.166.611.421 |
| 5 | 2018 | 10.445.329.515 | 31.206.972.502 | 41.652.302.017 |
| | JUMLAH | 61.461.651.074 | 198.381.515.711 | 259.843.166.785 |

Sumber : Seksi Iuran dan Peredaran Hasil Hutan (2019)

2.4.10. Pemberdayaan Masyarakat

Hutan merupakan salah satu sumber daya alam yang berperan dalam menjaga, mempertahankan dan meningkatkan ketersediaan air, udara dan kesuburan tanah. Ketersediaan air, udara dan kesuburan tanah merupakan urat nadi kehidupan manusia.

Untuk mempertahankan tata kelola lingkungan hidup yang lestari dalam mendukung pembangunan, maka pengelolaan hutan yang berkelanjutan harus menampung dinamika aspirasi dan peran serta masyarakat, adat dan budaya, serta tata nilai masyarakat berdasarkan pada norma hukum lokal dan nasional sehingga pelayanannya dapat dilakukan seoptimal mungkin bagi kesejahteraan umat manusia.

Paradigma baru pembangunan kehutanan saat ini menekankan bahwa hutan harus dipandang sebagai sumber daya secara komprehensif

dengan menitik beratkan pada pembangunan kehutanan bersama masyarakat. Oleh karena itu salah satu pendekatan pembangunan kehutanan adalah dengan melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif. Tujuan akhir dari proses pemberdayaan masyarakat adalah untuk memandirikan masyarakat agar dapat meningkatkan taraf hidup keluarga dengan mengoptimalkan sumberdaya yang dimilikinya. Daya, kekuatan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat secara memadai akan mendorong masyarakat untuk dapat mengakses sumber-sumber daya produktif, mandiri dalam pengambilan keputusan dan percaya diri dalam bertindak.

Sebagai bentuk pendekatan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan antara lain dengan pola pemberdayaan masyarakat secara berkelompok dengan membentuk Kelompok Tani Hutan (KTH). Jumlah KTH di Provinsi Maluku tahun 2019 Berdasarkan kelasnya sebagai berikut:

Tabel 20. KTH Provinsi Maluku Utara berdasarkan kelasnya

| No | Kabupaten Kota | Kelas KTH | | | Jumlah |
|--------|-----------------------|-----------|-------|-------|--------|
| | | Pemula | Madya | Utama | |
| 1 | Kota Ternate | 18 | 5 | - | 23 |
| 2 | Kota Tidore Kepulauan | 43 | 6 | - | 49 |
| 3 | Halmahera Barat | 35 | 0 | - | 35 |
| 4 | Halmahera Utara | 14 | 3 | - | 17 |
| 5 | Halmahera Timur | 4 | 2 | - | 6 |
| 6 | Halmahera Tengah | 19 | 1 | - | 20 |
| 7 | Halmahera Selatan | 24 | 1 | - | 25 |
| 8 | Pulau Morotai | 11 | 1 | - | 12 |
| 9 | Kepulauan Sula | 16 | - | - | 16 |
| 10 | Pulau Taliabu | 15 | - | - | 15 |
| JUMLAH | | 199 | 19 | - | 218 |

Sumber : Seksi Bina Kelembagaan Desa Hutan (2019)

Pola Pemberdayaan masyarakat yang sedang di kembangkan oleh pemerintah saat ini salah satunya adalah dengan skema Perhutanan Sosial. Perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Rakyat, Hutan Adat, dan Kemitraan Kehutanan.

Tujuan dari program ini sendiri adalah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui mekanisme pemberdayaan dan tetap berpedoman pada aspek kelestarian hutan. Berdasarkan hal tersebut maka hal ini menjadi kesempatan yang sangat besar bagi masyarakat sekitar hutan untuk dapat mengelola dan memberadayakan lahan hutan.

Sampai dengan tahun 2019, jumlah izin Perhutanan Sosial yang diberikan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Provinsi Maluku Utara sebanyak 44 SK ijin PS.

Tabel 21. Izin PS Provinsi Maluku Utara sampai dengan Tahun 2019

| No | Kabupaten Kota | Izin Perhutanan Sosial (PS) | | | | | Jumlah |
|---------------|-----------------------|-----------------------------|-----------|----------|----------|---------------------|-----------|
| | | HD | HKm | HTR | HA | Kemitraan Kehutanan | |
| 1 | Kota Ternate | 5 | 4 | - | - | - | 9 |
| 2 | Kota Tidore Kepulauan | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 3 | Halmahera Barat | 7 | 5 | 1 | - | - | 13 |
| 4 | Halmahera Utara | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 5 | Halmahera Timur | 2 | 4 | 1 | - | - | 7 |
| 6 | Halmahera Tengah | 1 | 1 | - | - | - | 2 |
| 7 | Halmahera Selatan | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 8 | Pulau Morotai | 6 | - | 1 | - | - | 7 |
| 9 | Kepulauan Sula | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Pulau Taliabu | 3 | - | - | - | - | 3 |
| JUMLAH | | 26 | 14 | 4 | - | - | 44 |

Sumber : Seksi Perhutanan Sosial (2019)

2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kehutanan

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan pada Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :

2.5.1. Tantangan

Tantangan yang dihadapi oleh Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara dalam melakukan pengembangan pelayanan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi adalah :

1. Kewenangan urusan kehutanan di daerah hanya ada di provinsi dan besarnya anggaran yang diperlukan untuk membiaya operasional, program dan kegiatan Dinas serta 10 UPTD KPH.
2. Tekanan terhadap kawasan hutan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan di berbagai bidang.
3. Menciptakan SDM yang profesional yang mampu menjawab permasalahan kehutanan ke depan.

2.5.2. Peluang

Peluang yang dimiliki oleh Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara dalam melakukan pengembangan pelayanan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi adalah :

1. Terdapat 16 unit KPH yang diwadahi oleh 10 kelembagaan UPTD KPH yang dapat di optimalkan tugas dan fungsinya dalam pengelolaan hutan di tingkat tapak.
2. Luas Kawasan hutan Provinsi Maluku Utara seluas 2,5 juta Ha dengan potensi sumber daya hutan yang cukup besar terutama hasil hutan bukan kayu (HHBK) dan jasa lingkungan yang belum di manfaatkan secara optimal.
3. Adanya dukungan regulasi/kebijakan dari Pemerintah yang memberikan peran seluas - luasnya kepada daerah dan masyarakat setempat dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan;

4. Dukungan penggunaan DBH DR yang semakin luas untuk pelaksanaan kegiatan teknis kehutanan.
5. Dukungan Anggaran Pemerintah pusat, Pemerintah Daerah dan sumber pembiayaan lainnya yang tidak mengikat dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan dan dikaitkan dengan rencana pembangunan Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024, kesemuanya merupakan keberlanjutan dari pembangunan tahun-tahun sebelumnya, sehingga dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan ke depan tidak lepas dari kondisi riil capaian pembangunan tahun sebelumnya.

Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan kehutanan dipecahkan, tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya di masa datang. Faktor-faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja, dan faktor-faktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalahan pembangunan atau dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Pada bagian ini, akan diuraikan permasalahan yang paling krusial tentang layanan dasar di tiap Bagian/Bidang/UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing melalui penilaian terhadap capaian kinerja yang belum mencapai target yang ditetapkan dalam rencana pembangunan tahun sebelumnya.

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kinerja.
2. Kurangnya ketersediaan data dan informasi yang terintegrasi.
3. Pengelolaan data sebagai acuan dalam mengambil kebijakan pembangunan kehutanan di daerah belum dilakukan secara optimal.
4. Standard Opresional Prosedur (SOP) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat belum tersedia secara lengkap.
5. Sistim Pengawasan Internal (SPI) dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan belum berjalan dengan optimal.
6. Penanganan lahan kritis yang belum optimal dan terintegrasi.
7. Pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan hutan belum dapat dilaksanakan secara maksimal.
8. Peran KPH selaku pengelola hutan di tingkat tapak belum dilaksanakan secara optimal.
9. Kebutuhan akan lahan yang terus meningkat akibat bertambahnya populasi penduduk di sekitar kawasan hutan.
10. Tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya keberadaan hutan yang masih rendah.
11. Meningkatnya peredaran hasil hutan illegal dan penebangan liar dalam kawasan hutan sebagai akibat tingginya kebutuhan hasil hutan kayu lokal.
12. Produksi kayu bulat masih bertumpu pada hutan alam sehingga belum dapat memenuhi kebutuhan industri kayu lokal.
13. Terdapat potensi tambang dan perijinan tambang di dalam kawasan hutan yang dapat menurunkan kualitas penutupan lahan.
14. Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan belum dilakukan secara optimal sehingga manfaatnya belum bisa dirasakan oleh masyarakat dan daerah.
15. Belum Optimalnya Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.

16. Belum Optimalnya Pengelolaan Daerah Aliran Sungai

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Telaah terhadap visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih bertujuan menyelaraskan dan mendukung perangkat daerah dalam mencapai target pembangunan selama periode kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Sesuai dengan RPJMD Provinsi Maluku Utara 2020-2024 Visi dan Misi Kepala Daerah adalah sebagai berikut :

1. Visi

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Provinsi Maluku Utara periode 2020-2024 adalah

“MALUKU UTARA SEJAHTERA”

Kata SEJAHTERA yang terkandung dalam visi tersebut adalah akronim dari kata SEHAT dan CERDAS berbudaya (sumber daya manusianya), MAJU (infrastruktur dan wilayahnya), AGAMIS DAN HARMONIS (masyarakatnya), TUMBUH EKONOMINYA (secara inklusif dan berkelanjutan), serta REFORMIS DAN ADIL (pemerintahan dan pelayanan publiknya) - sebagai tujuan akhir yang ingin dicapai. Adapun makna SEJAHTERA, yaitu adanya peningkatan taraf hidup masyarakat yang lebih baik, terwujudnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang berkualitas untuk semua melalui pemanfaatan sumberdaya alam secara berkelanjutan, yang bertumpu pada sumber daya maritim (sektor kelautan perikanan dan pariwisata), sektor pertanian dan perkebunan, dan industri pertambangan.

Penjabaran makna Visi pembangunan jangka menengah daerah sebagaimana dimaksud yaitu Maluku Utara Sehat dan Cerdas Berbudaya, mengandung arti masyarakat yang sehat secara jasmani

dan rohani maupun sosial; berkualitas dan berdaya saing yang menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi, serta senantiasa mengapresiasi kekayaan khasanah budaya, tradisi daerah dan kearifan lokal untuk meningkatkan kesejahteraan; Maluku Utara Maju, mengandung arti kemajuan pembangunan secara merata di seluruh wilayah, dengan mengakselerasi pembangunan infrastruktur yang handal guna menunjang aktifitas sosial dan ekonomi masyarakat, sehingga meningkatkan kualitas hidup masyarakat, perkembangan dan daya saing wilayah serta integrasi wilayah kepulauan; Maluku Utara Agamis dan Harmonis, mengandung arti masyarakat yang sejahtera lahir dan batin, yang penuh kedamaian menurut tuntunan ajaran agama yang dianut dan tata nilai lokal, memiliki kesadaran akan kemajemukan, yang senantiasa mengedepankan rasa saling menghormati dan saling menghargai dalam menyelesaikan setiap permasalahan dan kendala dalam pembangunan daerah; Maluku Utara Tumbuh Ekonominya, mengandung pertumbuhan ekonomi daerah yang tinggi, berkualitas dan inklusif serta tanpa kesenjangan, yang menciptakan kesempatan kerja produktif dan layak bagi setiap individu, melalui pemanfaatan secara optimal sumberdaya alam vital dan strategis yang menjadi unggulan daerah, dengan tetap mempertahankan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk generasi di masa depan; Maluku Utara Reformis dan Adil, mengandung arti tata kelola pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan melayani yang menjamin keterbukaan akses secara merata dan kesempatan yang sama dalam pelayanan publik, serta menjamin prinsip persamaan hak dihadapan hukum dan pemerintahan yang diarahkan pada penegakan supremasi hukum dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM).

2. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka di jabarkan dalam 5 (lima) misi sebagai berikut :

1. Membangun Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas dan Berbudaya. Misi pertama ini berangkat dari pemikiran bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) yang sehat, terdidik dan berbudaya merupakan bagian dari proses serta tujuan dari pembangunan itu sendiri. Sumber daya manusia berperan ganda, baik sebagai obyek sekaligus sebagai subyek pembangunan. Sebagai obyek pembangunan, SDM merupakan sasaran pembangunan untuk disejahterakan, dan sebagai subyek, berperan sebagai pelaku pembangunan yang sangat menentukan kemajuan. Keberhasilan misi yang pertama ini dengan demikian akan sangat menentukan keberhasilan pada keempat misi lainnya.
2. Mengakselerasi Pembangunan Infrastruktur, Konektifitas dan Pengembangan Wilayah. Akselerasi pembangunan infrastruktur dan konektifitas dimaksudkan untuk mempercepat pembangunan di seluruh wilayah, sehingga memungkinkan terpenuhinya kebutuhan pelayanan dasar masyarakat, serta menggerakkan roda perekonomian daerah utamanya dalam menunjang proses produksi maupun distribusi komoditi ekonomi. Adapun pengembangan wilayah merupakan upaya mencapai pembangunan berimbang (balance development), sesuai potensi dan keunggulan serta kapasitas pembangunan setiap wilayah.
3. Membangun Tatahidupan Masyarakat yang Agamis, Aman, Damai dan Harmonis. Misi ini ditujukan untuk menciptakan lingkungan yang damai, aman, tentram di semua aspek kehidupan masyarakat, baik dalam aspek ekonomi, sosial maupun budaya. Melalui tatahidupan masyarakat yang agamis, aman, damai

dan harmonis diharapkan mampu mendorong iklim daerah yang kondusif untuk kelancaran pembangunan di berbagai bidang.

4. Membangun Perekonomian Daerah yang Inklusif dan Berkualitas dengan Orientasi pada Nilai Tambah dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan, Misi ini bertujuan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang tinggi dan berkualitas, yang tercermin dari terjadinya transformasi struktural melalui industri-industri pengolahan yang meningkatkan nilai tambah komoditas vital dan strategis unggulan daerah, terciptanya kesempatan kerja layak sehingga meningkatkan produktifitas daerah, dengan tanpa menimbulkan kesenjangan pendapatan antar penduduk dan antar wilayah, serta tekanan pada lingkungan hidup di luar daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
5. Memantapkan Tatakelola Pemerintahan yang Lebih Baik dan Berkeadilan, Misi ini bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan daerah transformatif pada delapan area perubahan reformasi birokrasi yang telah ditetapkan pemerintah, sekaligus inovatif untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, kapasitas pemberdayaan masyarakat, dan daya saing daerah.

Dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kehutanan, Dinas Kehutanan mendukung kebijakan pembangunan daerah sebagaimana termuat dalam RPJMD Perubahan Maluku Utara Tahun 2020-2024. Keterkaitan antara Resntra Dinas Kehutanan dengan RPJMD Maluku Utara 2020 - 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 22. Tujuan, Sasaran dan Strategi RPJMD yang didukung oleh Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara

| Tujuan RPJMD | Sasaran RPJMD | Sub Sasaran | Strategi RPJMD |
|---|---|--|---|
| Misi 4 - Membangun Perekonomian Daerah yang Inklusif dan Berkualitas dengan Orientasi pada Nilai Tambah dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan | | | |
| Mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan, | Terwujudnya pembangunan yang berwawasan lingkungan, | Meningkatnya pengendalian keberadaan, fungsi dan | Meningkatkan pengendalian keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan |

| | | | |
|--|--|--|------------------------------------|
| berketahanan bencana dan perubahan iklim | berketahanan bencana dan perubahan iklim; dengan mendorong peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, dan penurunan Indeks Risiko Bencana Provinsi. | distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan, yang ditandai dengan meningkatnya Indeks Kualitas Tutupan Lahan | yang berkeadilan dan berkelanjutan |
|--|--|--|------------------------------------|

Sumber : RPJMD Perubahan Maluku Utara Tahun 2020-2024

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Kehutanan

Dalam Penyusunan Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara perlu diselaraskan dengan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang merupakan jalur koordinasi teknis Kehutanan di tingkat pusat, sehingga terjadi keselarasan arah pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah.

Dalam Renstra KLHK termuat empat tujuan strategis sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kehutanan serta ketahanan terhadap perubahan iklim;
2. Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi dari sumber daya hutan dan lingkungan hidup;
3. Meningkatkan akses kelola hutan bagi masyarakat baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara dengan tetap menjaga keberadaan dan kelestarian fungsi hutan;
4. Meningkatkan tata kelola, inovasi dan daya saing bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Untuk mencapai tujuan strategis KLHK menetapkan Sasaran strategis sebagai berikut :

1. Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim;
2. Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
3. Terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan;
4. Terselenggaranya tata kelola dan inovasi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan (LHK) yang baik serta kompetensi SDM LHK yang berdaya saing.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Untuk menyelaraskan pembangunan Provinsi Maluku Utara khususnya bidang kehutanan dengan tata ruang wilayah Provinsi Maluku Utara, maka penyusunan Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara juga memperhatikan Tata Ruang Provinsi Maluku Utara.

Tujuan penataan ruang wilayah Provinsi Maluku Utara adalah untuk :

- a. Mewujudkan ruang wilayah provinsi yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan;
- b. Mewujudkan keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- c. Mewujudkan keseimbangan dan keserasian antar wilayah dan antar sektor;
- d. Mewujudkan wilayah Provinsi Maluku Utara yang mengakomodasikan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah kabupaten/kota serta keserasian antar sektor.

5. Telaan Terhadap Struktur Ruang

Rencana struktur ruang wilayah Provinsi Maluku Utara meliputi Sistem Perkotaan Provinsi, Sistem Jaringan Transportasi, Sistem Jaringan Energi dan Kelistrikan, Sistem Jaringan Telekomunikasi dan Sistem Jaringan Sumber Daya Air.

Dalam kaitan dengan struktur ruang Sistem Perkotaan Provinsi, dilakukan berbagai upaya yang dapat mendukung pembangunan Kota Baru Sofifi yang berkelanjutan terutama dalam mempertahankan dan menjaga kelestarian kawasan lindung yang telah ditetapkan, demikian pula halnya dengan sistem perkotaan lainnya dalam wilayah Provinsi Maluku Utara. Upaya mempertahankan dan menjaga kelestarian kawasan lindung adalah dengan mengendalikan pemanfaatan ruang kawasan lindung dimana pengembangan wilayah perkotaan harus memperhatikan fungsi lindung dari kawasan tersebut.

Terkait dengan Sistem Jaringan Transportasi, Sistem Jaringan Energi dan Kelistrikan, serta Sistem Jaringan Telekomunikasi, upaya yang dilakukan untuk mendorong, mengendalikan dan membatasi pengembangan wilayah adalah melalui peningkatan koordinasi dengan berbagai pihak khususnya dalam pemanfaatan ruang di dalam kawasan hutan.

Untuk menjamin Sistem Jaringan Sumber Daya Air hal yang dapat dilakukan adalah dengan mempertahankan kawasan hutan, tutupan lahan berhutan dan kawasan resapan air atau kawasan yang berfungsi hidrologis.

6. Telaan terhadap Pola Ruang

Kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang wilayah Provinsi Maluku Utara meliputi kebijakan pengembangan kawasan lindung dan kebijakan pengembangan kawasan budidaya.

Pengembangan Kawasan lindung meliputi kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan konservasi, kawasan rawan bencana alam, kawasan lindung geologi dan kawasan lindung lainnya

Kawasan budi daya mencakup wilayah daratan dan lautan yang terdiri dari Kawasan peruntukan hutan produksi terbatas, Kawasan peruntukan hutan produksi tetap, Kawasan peruntukan hutan produksi yang dapat dikonversi. Pemanfaatan kawasan budi daya meliputi Kawasan Budidaya non hutan dan perkebunan yang dapat dikonversikan, Kawasan Pertanian, yaitu pertanian lahan basah dan perkebunan, Kawasan Pertambangan, Kawasan Perindustrian, Kawasan Pariwisata, Kawasan Perikanan, Kawasan Permukiman

Dari penelaahan pola ruang Provinsi Maluku Utara tidak ada penghambat Pelayanan Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara sedangkan pendorong pelayanan dinas kehutanan Provinsi Maluku Utara dari penelaahan terhadap RTRW adalah kegiatan Rehabilitasi dan Pemantapan Fungsi Kawasan Lindung Provinsi dan Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Andalan untuk Sektor Kehutanan.

Dilihat dari pelayanan Dinas Kehutanan yang berkaitan dengan pola ruang Provinsi Maluku Utara yaitu Pemanfaatan kawasan hutan produksi diarahkan untuk pengembangan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu/non kayu melalui perizinan usaha di bidang kehutanan, penggunaan kawasan untuk pertambangan dan Perhutanan Sosial, Sedangkan pemanfaatan kawasan hutan lindung dan konservasi diarahkan untuk pemanfaatan jasa lingkungan, ekowisata dan pemanfaatan HHBK .

Pembangunan sektor kehutanan juga memperhatikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang pada intinya adalah mengkaji sejauh mana daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup mampu mendukung pengembangan wilayah tersebut seperti ketersediaan air, resiko kebencanaan dan sebagainya.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah

untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan yang dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persoalan nyata yang dihadapi dalam pembangunan.

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan Perangkat Daerah senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi di masa datang.

Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis dalam perencanaan pembangunan daerah di Provinsi Maluku Utara dapat diidentifikasi beberapa hal sebagai berikut :

1. Masih Luasnya lahan kritis di Provinsi Maluku Utara.
2. Belum Optimalnya fungsi KPH sebagai pengelola hutan di tingkat tapak.
3. Gangguan Keamanan Hutan dan tertib peredaran hasil hutan
4. Belum Optimalnya pemberdayaan masyarakat sekitar hutan terutama melalui perhutanan sosial.
5. Pemanfaatan hutan bukan kayu
6. Pengendalian perizinan penggunaan kawasan hutan, pemanfaatan hasil hutan dan pengolahan hasil hutan.
7. Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

8. Pengelolaan daerah aliran sungai (DAS)
9. Peningkatan SDM, Sarana dan Prasarananya

BAB. IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. TUJUAN DAN SASARAN 2020-2024

Dari pembahasan yang telah di uraikan pada bab satu sampai dengan empat maka dapat di rumuskan tujuan dan sasaran Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara untuk lima tahun periode Rensta. Perumusan tujuan dan sasaran di perlukan untuk lebih memfokuskan arah pembangunan dan sebagai bahan evaluasi kinerja tahunan dan lima tahunan.

Tujuan dan sasaran serta indikator Renstra Perubahan Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara periode 2020-2024 sebagai berikut :

Tabel 23. Tujuan dan Sasaran Strategis Jangka Menengah Pelayanan OPD

| No | Tujuan | Indikator tujuan | Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke- | | | | | Sasaran | Indikator sasaran | Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke- | | | | |
|----|--|--------------------------------------|---------------------------------------|-------|-------|-------|-------|---|-------------------------|---------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Mewujudkan pengelolaan hutan lestari dengan mempertahankan tutupan lahan melalui pelibatan masyarakat untuk lingkungan hidup yang lebih baik | Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) | 86,18 | 86,17 | 86,39 | 86,60 | 86,82 | Mempertahankan kualitas tutupan hutan dan lahan | Rasio Tutupan Lahan (%) | 64,00 | 64,05 | 64,10 | 64,15 | 64,20 |

IKTL merupakan indikator kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara yang mendukung indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) pada RPJMD Provinsi Maluku Utara dan merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara. Target capaian kinerja IKTL untuk 2020-2024 di jelaskan table 28.

BAB. V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berdasarkan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara maka dapat dirumuskan strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud.

Adapun Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara periode 2020-2024 sebagai berikut :

Tabel 24. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

| Visi | “Maluku Utara Sejahtera” | | | |
|------|--|---|---|--|
| Misi | Membangun Perekonomian Daerah yang Inklusif dan Berkualitas dengan Orientasi pada Nilai Tambah dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan | | | |
| No. | Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
| | Mewujudkan hutan yang lestari dengan meningkatkan penutupan lahan serta perlindungan hutan dengan melibatkan masyarakat untuk lingkungan hidup yang lebih baik | Mempertahankan kualitas tutupan hutan dan lahan | Meningkatkan kualitas penutupan lahan terutama dengan merehabilitasi lahan kritis | Penguatan KPH sebagai pengelola hutan ditingkat tapak, penguatan data base kehutanan, pembinaan dan pengendalian izin usaha bidang kehutanan, rehabilitasi di luar kawasan hutan Negara, pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, perlindungan hutan, mendorong pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pembinaan dan pengendalian industri hasil hutan dan pembinaan dan pengendalian perbenihan kehutanan. |
| | | | Melakukan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya | Pengendalian dan pengawasan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran CITES, Pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting dan pemeberdayaan masyarakat sekitara kawasan bernilai ekosistem penting. |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | Peningkatan kapasitas masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan melalui penyuluhan | Peningkatan kapasitas dan kompetensi penyuluh kehutanan, Penguatan dan pendampingan kelembagaan kelompok tani hutan, penyiapan dan pengembangan perhutanan sosial. |
| | | | Meningkatkan kualitas dan fungsi DAS | Penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan das, optimalisasi fungsi dan daya dukung wilayah das, pengembangan kelembagaan pengelolaan das |

BAB VI.

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program OPD Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara yang telah ditetapkan dalam RPJMD merupakan program prioritas untuk menyukseskan pembangunan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu per Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan oleh Perangkat Daerah kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah.

Tabel 25 : Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara Tahun 2020

| Tujuan | Sasaran | Kode | | | | | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (Output) | Satuan | Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab | Lokasi |
|--|---|------|---|---|---|---|--|--|--------|--|---|----------|--|--|-------------------|
| | | | | | | | | | | | 2020 | | Kondisi kinerja pada akhir periode restra perangkat daerah | | |
| | | | | | | | | | | | Target | RP. Juta | | | |
| Mewujudkan hutan yang lestari dengan mempertahankan penutupan lahan serta perlindungan hutan dengan melibatkan masyarakat untuk lingkungan hidup yang lebih baik | Mempertahankan kualitas tutupan hutan dan lahan | | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN | | | | | 19.050 | | Dinas Kehutanan | |
| | | 3 | 4 | 1 | 1 | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran | % | 100 | | 2.358 | 100 | | Sofifi dan 10 KPH |
| | | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | Penyediaan jasa surat menyurat | Jangka Waktu Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Bulan | | 12 | 20 | | | |
| | | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik | Jangka Waktu Penyediaan Jasa Air, Listrik dan Internet | Bulan | | 12 | 232 | | | |
| | | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | Jasa Kebersihan Kantor | Jangka Waktu Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Bulan | | 12 | 149 | | | |
| | | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jangka Waktu Penyediaan ATK | Bulan | | 12 | 227 | | | |
| | | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jangka Waktu Penyediaan Penggandaan dan barang cetakan | Bulan | | 12 | 20 | | | |
| | | 3 | 4 | 1 | 1 | 6 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran | Jumlah Perlatan kantor | Unit | | 30 | 250 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|----|--|---|-------|-----|-----|-------|-----|--|-------------------|
| | | | | | | 3 | 4 | 1 | 1 | 7 | Penyediaan Makan Minum | Jangka Waktu Penyediaan Penggandaan dan barang cetakan | Bulan | | 12 | 250 | | | |
| | | | | | | 3 | 4 | 1 | 1 | 8 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah | Jangka Waktu Pelaksanaan rapat-rapat kerja/ koordinasi/ konsultasi luar daerah | Bulan | | 12 | 750 | | | |
| | | | | | | 3 | 4 | 1 | 1 | 9 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah | Jangka Waktu Pelaksanaan rapat-rapat kerja/ koordinasi/ konsultasi/ supervisi dan perjalanan dalam daerah lainnya | Bulan | | 12 | 300 | | | |
| | | | | | | 3 | 4 | 1 | 1 | 10 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Jangka Waktu Pembayaran Honorarium pengelola Keg dan PTT | Bulan | | 12 | 160 | | | |
| | | | | | | 3 | 4 | 1 | 2 | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan Prasarana Aparatur | % | 100 | 100 | 1.655 | 100 | | Sofifi dan 10 KPH |
| | | | | | | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | Unit | | 1 | 400 | | | |
| | | | | | | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | Pengadaan peralatan gedung kantor | Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Unit | | 5 | 50 | | | |
| | | | | | | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | Pengadaan mebeleur | Jumlah Pengadaan Mebeleur | Unit | | 10 | 30 | | | |
| | | | | | | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor | Jangka Waktu Pemeliharaan Gedung dan Peralatan kantor | Bulan | | 12 | 370 | | | |
| | | | | | | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional | Jangka Waktu Pemeliharaan Kendaraan Dinas | Bulan | | 12 | 380 | | | |
| | | | | | | 3 | 4 | 1 | 2 | 6 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor | Jumlah Pekerjaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor | Paket | | 1 | 150 | | | |
| | | | | | | 3 | 4 | 1 | 2 | 7 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur | Jumlah Pengadaan Pakian Kerja dan Hari Tertentu | Stel | | 2 | 275 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|----|---|---|---|--------------|------|-------|-----|--|-------------------|
| | | 3 | 4 | 1 | 5 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 90 | | 90 | 487 | 90 | | Dalam/Luar daerah |
| | | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat Teknis Kehutanan dan Non Teknis | Orang | | 487 | | | |
| | | 3 | 4 | 1 | 22 | Program Perencanaan dan Penataan Kawasan Hutan | Persentase KPH memiliki dokumen perencanaan | % | 37,5 | 62,5 | 3.500 | 100 | | Maluku Utara |
| | | 3 | 4 | 1 | 22 | 1 | Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Hutan | Dokumen | 13 | 1.250 | | | |
| | | 3 | 4 | 1 | 22 | 2 | Rapat Koordinasi Kesatuan Pengelolaan Hutan | Jumlah Kegiatan Rakor | Keg | 2 | 161 | | | |
| | | 3 | 4 | 1 | 22 | 3 | Monitoring Penggunaan Kawasan Hutan | Jumlah IPPKH yang di Monitoring | IPPKH | 4 | 150 | | | |
| | | 3 | 4 | 1 | 22 | 4 | Monitoring Penggunaan atau pembuatan Koridor | Jumlah Lokasi | Lokasi | 4 | 88 | | | |
| | | 3 | 4 | 1 | 22 | 5 | Penyusunan Statistik Kehutanan | Jumlah Dokumen Statistik | Dokumen | 1 | 51 | | | |
| | | 3 | 4 | 1 | 22 | 6 | Penataan Blok/Petak Pengelolaan KPH | Jumlah KPH yang dilakukan Penataan Blok | KPH | 2 | 250 | | | |
| | | 3 | 4 | 1 | 22 | 7 | Penyusunan Rencana Bisnis KPH (Bisnis Plan) | Jumlah Dokumen Rencana Bisnis KPH | Dokumen | 1 | 100 | | | |
| | | 3 | 4 | 1 | 22 | 8 | Pengembangan Promosi, Investasi, Kerja Sama dan Kemitraan KPH | Jumlah Kegiatan Promosi, Kemitraan KPH | Keg | 1 | 100 | | | |
| | | 3 | 4 | 1 | 22 | 9 | Monitoring pelaksanaan tata batas IUPHHK-HA dan HTI | Jumlah Lokasi (Jumlah IUPHHK-HA dan HTI) | IUPHHK-HA/HT | 4 | 100 | | | |
| | | 3 | 4 | 1 | 22 | 10 | Inventarisasi Potensi Sumber Daya Hutan | Jumlah Jenis Potensi yang diidentifikasi | Jenis | 3 | 300 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|---|----|---|--|---|--------------|-----------|-----------|------------|-----------|--|---------------------|
| | | | | 3 | 4 | 1 | 24 | 2 | Penanganan Tindak Pidana Bidang Kehutanan | Jumlah Kasus Tipihut yang terselesaikan | Kasus | | 3 | 300 | | | |
| | | | | 3 | 4 | 1 | 24 | 3 | Pencegahan dan Pengendalian Kerusakan Hutan | Jumlah Lokasi | Lokasi | | 2 | 300 | | | |
| | | | | 3 | 4 | 1 | 24 | 4 | Pos Pengamanan Hutan | Jumlah Pos Pengamanan Hutan | Pos | | 1 | 200 | | | |
| | | | | 3 | 4 | 1 | 24 | 5 | Sosialisasi Perlindungan dan Pengamanan Hutan | Jumlah Peserta | Orang | | 30 | 100 | | | |
| | | | | 3 | 4 | 1 | 24 | 6 | Koordinasi Perlindungan dan Pengamanan Hutan | Jumlah Daerah Kooordinasi Perlindungan Hutan | Kab/Kota | | 1 | 100 | | | |
| | | | | 3 | 4 | 1 | 25 | | Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan | Jumlah titik api terdeteksi | Titik | 30 | 25 | 500 | 10 | | Maluku Utara |
| | | | | 3 | 4 | 1 | 25 | 1 | Perencanaan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan | Jumlah Dokumen Perencanaan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan | Dokumen | | 1 | 100 | | | |
| | | | | 3 | 4 | 1 | 25 | 2 | Penyelenggaraan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan | Jumlah Peserta Sosialisasi Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan | Orang | | 30 | 50 | | | |
| | | | | 3 | 4 | 1 | 25 | 3 | | Jumlah Lokasi Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan | Lokasi | | 3 | 50 | | | |
| | | | | 3 | 4 | 1 | 25 | 4 | Penyelenggaraan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan | Jumlah Lokasi | Lokasi | | 2 | 100 | | | |
| | | | | 3 | 4 | 1 | 25 | 5 | Penyelenggaraan Penanggulangan Pasca Kebakaran Hutan dan Lahan | Jumlah Lokasi | Lokasi | | 2 | 100 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|----------|----------|----------|-----------|---|--|---|-----------|------------|------------|--------------|--------------|--|--|---------------------|
| | | | | | | 3 | 4 | 1 | 25 | 6 | Pembentukan Masyarakat Peduli Api | Jumlah Kelompok Masyarakat Peduli Api | Kelompok | | 1 | 50 | | | | |
| | | | | | | 3 | 4 | 1 | 25 | 7 | Pengadaan sarana dan prasarana pendukung Karhutla | Jumlah paket sarana prasana pendukung pengendalian Karhutla | Unit | | 5 | 50 | | | | |
| | | | | | | 3 | 4 | 1 | 27 | | Program RHL Yang Meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi | Luasan lahan kritis di luar kawasan hutan negara yang kritis yang direhabilitasi | Ha | 400 | 200 | 4.000 | 1.600 | | | Maluku Utara |
| | | | | | | 3 | 4 | 1 | 27 | 1 | Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan | Luas Hutan dan Lahan yang di Reboisasi dan Rehabilitasi | Ha | | 200 | 2.800 | | | | |
| | | | | | | | | | | | Luas Pemeliharaan Tanaman | Ha | | 200 | | | | | | |
| | | | | | | 3 | 4 | 1 | 27 | 2 | Penyusunan Rencana Teknis Rehabilitasi Hutan dan Lahan | Dokumen Rantek | Dokumen | | 1 | 200 | | | | |
| | | | | | | 3 | 4 | 1 | 27 | 3 | Penghijauan Lahan | Luas Penanaman | Ha | | 2 | 50 | | | | |
| | | | | | | 3 | 4 | 1 | 27 | 4 | Rehabilitasi Mangrove | Luas Lahan Mangrove yang di rehabilitasi | Ha | | 10 | 250 | | | | |
| | | | | | | 3 | 4 | 1 | 27 | 4 | Peringatan Hari-hari Besar Kehutanan | Jumlah Kegiatan Hari Menanam | Keg | | 1 | 150 | | | | |
| | | | | | | 3 | 4 | 1 | 27 | 5 | Pembangunan Bangunan Konservasi Tanah dan Air | Jumlah Bangunan KTA | Unit | | 5 | 150 | | | | |
| | | | | | | 3 | 4 | 1 | 27 | 6 | Monitoring dan Evaluasi Rehabilitasi Hutan dan Lahan | Jumlah Laporan | Laporan | | 1 | 200 | | | | |
| | | | | | | 3 | 4 | 1 | 27 | 7 | Perencanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan | Jumlah Dokumen/Reviu Rencana RHL, RTn RHL | Dokumen | | 1 | 100 | | | | |
| | | | | | | 3 | 4 | 1 | 27 | 8 | Pemantauan dan Pembinaan Rehabilitasi Hutan Pada Areal berizin | Jumlah Pemegang Ijin yang di Pantau dan di Bina | Izin | | 4 | 100 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|---|---|----|----|--|--|---------|--|---|-----|--|--|--|
| | | | | | | 3 | 4 | 1 | 30 | 6 | Peningkatan Kapasitas SDM Kelompok Tani Hutan | Jumlah KTH Yang dibina | KTH | | 5 | 110 | | | |
| | | | | | | 3 | 4 | 1 | 30 | 7 | Penguatan Kapasitas Kelembagaan Kelompok Tani Desa Hutan | Jumlah KTH yang di tingkatkan kelembagaannya | KTH | | 6 | 90 | | | |
| | | | | | | 3 | 4 | 1 | 30 | 8 | Bantuan Sarana Prasarana Ekonomi Produktif untuk KTH | Jumlah unit Sarpras | Unit | | 4 | 300 | | | |
| | | | | | | 3 | 4 | 1 | 30 | 9 | Identifikasi dan Inventarisasi Hutan Adat dan Kawasan Hutan Khusus | Jumlah lokasi keg Identifikasi dan Inventarisasi | Lokasi | | 5 | 150 | | | |
| | | | | | | 3 | 4 | 1 | 30 | 10 | Pembinaan dan Pendampingan HKm, HD dan HTR (Perhutanan Sosial) | Jumlah Peserta Sosialisasi | Orang | | 5 | 100 | | | |
| | | | | | | 3 | 4 | 1 | 30 | 11 | Pengembangan Sarana dan Prasarana Usaha Ekonomi Produktif | Jumlah Sarpras Pengembangan | KTH | | 2 | 50 | | | |
| | | | | | | 3 | 4 | 1 | 30 | 12 | Monitoring dan Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat | Jumlah Laporan | Laporan | | 1 | 100 | | | |

**Tabel 26 : Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Kehutanan
Provinsi Maluku Utara**

| KODE | URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR | SATUAN | Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2019) | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Kondisi kinerja pada akhir periode renstra perangkat daerah | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab | Lokasi |
|------|--|-----------|--------|---|---|---|-------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|---|-------------|---|--------|
| | | | | | Target | RP. Juta | Target | RP. Juta | Target | RP. Juta | Target | RP. Juta | Target | RP. Juta | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| 3 | 28 | | | | | 19.102 | | 43.810 | | 24.853 | | 26.805 | 0 | 114.569 | | |
| 3 | 28 | 01 | | | | 67,97 | 2.810 | 100 | 6.876 | 100 | 3.105 | 100 | 3.105 | 100 | 15.896 | |
| 3 | 28 | 01 | 101 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 28 | 01 | 101 | 01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan/Anggaran/Laporan Kinerja Tersedia | Dokumen | | 5 | 30 | 5 | 30 | 5 | 30 | 5 | 120 |
| 3 | 28 | 01 | 101 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 4 | 40 |
| 3 | 28 | 01 | 101 | 02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dokumen | | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 4 | 40 |
| 3 | 28 | 01 | 101 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 4 | 40 |
| 3 | 28 | 01 | 102 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 28 | 01 | 102 | 01 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase pelaksanaan administrasi keuangan | Persen | | 100 | 45 | 100 | 45 | 100 | 45 | 100 | 180 |
| 3 | 28 | 01 | 102 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/Bulan | | 252 | 10 | 252 | 10 | 252 | 10 | 252 | 40 |
| 3 | 28 | 01 | 102 | 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Dokumen | | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 4 | 20 |
| 3 | 28 | 01 | 102 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Laporan | | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 4 | 60 |
| 3 | 28 | 01 | 102 | 06 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | Dokumen | | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 4 | 60 |
| 3 | 28 | 01 | 103 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 28 | 01 | 103 | 01 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Tertibnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Bulan | | 12 | 35 | 12 | 35 | 12 | 35 | 12 | 140 |
| 3 | 28 | 01 | 103 | 01 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Dokumen | | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 4 | 40 |
| 3 | 28 | 01 | 103 | 04 | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | Laporan | | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 4 | 100 |
| 3 | 28 | 01 | 104 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 28 | 01 | 104 | 01 | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | Tertibnya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | Bulan | | | 20 | | 20 | | 20 | 0 | 80 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|-----|----|--|---|---------------|--|------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|--|
| 3 | 28 | 01 | 104 | 01 | Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah | Dokumen | | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 4 | 40 | | |
| 3 | 28 | 01 | 104 | 02 | Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah | Dokumen | | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 4 | 40 | | |
| 3 | 28 | 01 | 105 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persen | | 100 | 175 | 100 | 185 | 100 | 196 | 100 | 196 | 100 | 752 | | |
| 3 | 28 | 01 | 105 | 04 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | Dokumen | | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 4 | 60 | Dishut | |
| 3 | 28 | 01 | 105 | 05 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Dokumen | | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 4 | 120 | Dishut | |
| 3 | 28 | 01 | 105 | 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | Orang | | 5 | 100 | 5 | 110 | 5 | 121 | 5 | 121 | 20 | 452 | Dishut | |
| 3 | 28 | 01 | 105 | 10 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Orang | | 25 | 30 | 25 | 30 | 25 | 30 | 25 | 30 | 100 | 120 | Dishut | |
| 3 | 28 | 01 | 106 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persen | | 100 | 590 | 100 | 833 | 100 | 860 | 100 | 860 | 100 | 3.142 | | |
| 3 | 28 | 01 | 106 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | | 1 | 15 | 1 | 17 | 1 | 19 | 1 | 19 | 4 | 69 | Dishut/KPH | |
| 3 | 28 | 01 | 106 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Paket | | 1 | 100 | 1 | 110 | 1 | 121 | 1 | 121 | 4 | 452 | Dishut/KPH | |
| 3 | 28 | 01 | 106 | 07 | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | Paket | | 1 | 150 | 1 | 110 | 1 | 121 | 1 | 121 | 4 | 502 | Dishut/KPH | |
| 3 | 28 | 01 | 106 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | | 1 | 300 | 1 | 568 | 1 | 568 | 1 | 568 | 4 | 2.004 | Dishut/KPH | |
| 3 | 28 | 01 | 106 | 11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Dokumen | | 1 | 25 | 1 | 28 | 1 | 31 | 1 | 31 | 4 | 115 | Dishut | |
| 3 | 28 | 01 | 107 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tahun berjalan | Unit | | 100 | 70 | 100 | 220 | 100 | 306 | 100 | 190 | 100 | 787 | | |
| 3 | 28 | 01 | 107 | 02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | Unit | | | | 4 | 100 | 1 | 36 | 1 | 36 | 6 | 173 | Dishut/KPH | |
| 3 | 28 | 01 | 107 | 05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | Paket | | 5 | 50 | 20 | 100 | 30 | 250 | 20 | 134 | 75 | 534 | Dishut/KPH | |
| 3 | 28 | 01 | 107 | 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Unit | | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 4 | 80 | Dishut/KPH | |
| 3 | 28 | 01 | 108 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persen | | 100 | 480 | 100 | 1.449 | 100 | 756 | 100 | 800 | 100 | 3.485 | | |
| 3 | 28 | 01 | 108 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Laporan | | 1 | 300 | 1 | 449 | 1 | 300 | 1 | 300 | 4 | 1.349 | Dishut/KPH | |
| 3 | 28 | 01 | 108 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | | 1 | 180 | 1 | 1.000 | 1 | 456 | 1 | 500 | 4 | 2.200 | Dishut | |
| 3 | 28 | 01 | 109 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Bulan | | 12 | 1.385 | 12 | 4.079 | 12 | 877 | 12 | 949 | 12 | 7.290 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|-----|---------------------------|---|--|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|-------|------|--|--|
| 3 | 28 | 01 | 109 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Unit | | 50 | 730 | 50 | 900 | 50 | 500 | 50 | 500 | 200 | 2.630 | Dishut/KPH | | | | |
| 3 | 28 | 01 | 109 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Unit | | 30 | 200 | 30 | 220 | 30 | 200 | 30 | 200 | 120 | 820 | Dishut/KPH | | | | |
| 3 | 28 | 01 | 109 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | | 11 | 455 | 11 | 2.959 | 11 | 177 | 11 | 249 | 44 | 3.900 | Dishut/KPH | | | | |
| 3 | 28 | 03 | | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN | Persentase KPH memiliki Dokumen Perencanaan | % | 68,75 | 93,75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 75.484 | | | | | |
| | | | | | Penurunan volume pencurian hasil hutan kayu (M3) | M3 | 253,57 | 94,5 | 92,14 | 89,83 | 87,59 | 87,59 | 87,59 | 87,59 | 87,59 | 87,59 | 87,59 | 87,59 | 87,59 | 87,59 | | | |
| | | | | | Penurunan jumlah titik api terdeteksi | titik | 128 | 133 | 100 | 66 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | | |
| | | | | | Luasan lahan kritis di luar kawasan hutan negara yang direhabilitasi (Ha) | Ha | 480 | 1150 | 1208 | 1268 | 1331 | 1331 | 1331 | 1331 | 1331 | 1331 | 1331 | 1331 | 1331 | 1331 | 1331 | | |
| 3 | 28 | 03 | 101 | | Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi | Jumlah Pemenuhan Operasional Pengelolaan Hutan oleh KPH | % | | 20 | 1.200 | 25 | 6.220 | 35 | 6.183 | 50 | 6.801 | 50 | 20.404 | | | | | |
| 3 | 28 | 03 | 101 | 01 | Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan | Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun | Dokumen | | 1 | 150 | 1 | 165 | 1 | 500 | 1 | 550 | 4 | 1.365 | Dishut/KPH | | | | |
| 3 | 28 | 03 | 101 | 02 | Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan | Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lindung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok | Unit | | 1 | 50 | 1 | 55 | 1 | 60 | 1 | 66 | 4 | 231 | Dishut/KPH | | | | |
| 3 | 28 | 03 | 101 | 03 | Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH | Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbanqun | Unit | | 10 | 500 | 50 | 3.500 | 50 | 2.000 | 50 | 2.200 | 160 | 8.200 | Dishut/KPH | | | | |
| 3 | 28 | 03 | 101 | 04 | Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi | Dokumen | | 1 | 500 | 1 | 2.500 | 1 | 3.623 | 1 | 3.985 | 4 | 10.608 | Dishut | | | | |
| 3 | 28 | 03 | 102 | | Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) | Jumlah Dokumen Perencanaan KPH (RPHJPD) | Dokumen | | 1 | 150 | 16 | 250 | 16 | 100 | 16 | 110 | 49 | 610 | | | | | |
| 3 | 28 | 03 | 102 | 01 | Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun | Dokumen | | 1 | 150 | 16 | 250 | 16 | 100 | 16 | 110 | 16 | 610 | Dishut | | | | |
| 3 | 28 | 03 | 103 | | Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung | Jumlah Pemegang Persetujuan yang di Kendalikan | Unit | | 10 | 955 | 10 | 2.991 | 10 | 510 | 10 | 551 | 40 | 5.007 | | | | | |
| 3 | 28 | 03 | 103 | 01 | Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi | Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala | Dokumen | | 1 | 75 | 1 | 83 | 1 | 80 | 1 | 88 | 4 | 326 | Dishut/KPH | | | | |
| 3 | 28 | 03 | 103 | 02 | Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung | Tersedianya Data dan Informasi Luas Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung | Dokumen | | 1 | 50 | 1 | 55 | 1 | 60 | 1 | 66 | 4 | 231 | Dishut/KPH | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|-----|----|---|---|-----------|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|------------|--|
| 3 | 28 | 03 | 103 | 03 | Pelayanan Perizinan Usaha/Kerjasama Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung pada Blok Pemanfaatan Kecuali pada Wilayah Perum Perhutatan | Jumlah Dokumen Analisis dalam Rangka Pemberian Pertimbangan Teknis Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) | Dokumen | | 1 | 80 | 1 | 88 | 1 | 90 | 1 | 99 | 4 | 357 | Dishut/KPH | |
| 3 | 28 | 03 | 103 | 04 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPB Di Kawasan Hutan Produksi | Dokumen | 117 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 4 | 400 | Dishut/KPH | |
| 3 | 28 | 03 | 103 | 05 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPB Di Kawasan Hutan Lindung | Dokumen | | 1 | 50 | 1 | 55 | 1 | 60 | 1 | 66 | 4 | 231 | | |
| 3 | 28 | 03 | 103 | 06 | Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi | Terlaksananya Penilaian Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi | Dokumen | | 1 | 50 | 1 | 55 | 1 | 60 | 1 | 66 | 4 | 231 | | |
| 3 | 28 | 03 | 103 | 07 | Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Lindung | Terlaksananya Penilaian Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Lindung | Dokumen | | 1 | 50 | 1 | 55 | 1 | 60 | 1 | 66 | 4 | 231 | | |
| 3 | 28 | 03 | 103 | 09 | Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan | Jumlah Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan | | | 1 | 500 | 1 | 2.500 | | | | | | 3.000 | Dishut | |
| 3 | 28 | 03 | 104 | | Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara | Luas lahan kritis yang direhabilitasi | Ha | | 1150 | 4.396 | 1208 | 9.130 | 1268 | 5.683 | 1331 | 6.269 | 4957 | 25.478 | | |
| 3 | 28 | 03 | 104 | 01 | Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) | Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL) | Dokumen | | 1 | 250 | 1 | 275 | 1 | 200 | 1 | 220 | 4 | 945 | Dishut | |
| 3 | 28 | 03 | 104 | 02 | Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara | Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara | Ha | | 200 | 3.196 | 500 | 7.825 | 150 | 4.115 | 150 | 4.574 | 1.000 | 19.710 | Dishut/KPH | |
| 3 | 28 | 03 | 104 | 03 | Pembangunan Hutan Kota di Luar Kawasan Hutan Negara | Luas Hutan Kota yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara | Ha | | - | - | - | - | 10 | 50 | 10 | 55 | 20 | 105 | Dishut/KPH | |
| 3 | 28 | 03 | 104 | 04 | Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara | Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara | Ha | | 3 | 150 | 3 | 150 | 10 | 50 | 10 | 55 | 26 | 405 | Dishut/KPH | |
| 3 | 28 | 03 | 104 | 05 | Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan | Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun | Unit | | 10 | 500 | 10 | 550 | 10 | 605 | 10 | 666 | 40 | 2.321 | Dishut/KPH | |
| 3 | 28 | 03 | 104 | 08 | Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan | Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan | Laporan | | 1 | 300 | 1 | 330 | 1 | 363 | 1 | 399 | 4 | 1.392 | Dishut/KPH | |
| 3 | 28 | 03 | 104 | 09 | Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan | Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi | Ha | | 0 | - | 0 | - | 10 | 300 | 10 | 300 | 20 | 600 | Dishut/KPH | |
| 3 | 28 | 03 | 105 | | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi | Jumlah luas pengamanan hutan (illegal logging dan perambahan) | Ha | | 20000 | 1.600 | 25000 | 3.155 | 50000 | 3.887 | 50000 | 4.275 | 145000 | 12.917 | | |
| 3 | 28 | 03 | 105 | 01 | Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan | Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan | Ha | | 15.000 | 250 | 20.000 | 1.000 | 4.500 | 1.500 | 4.500 | 1.650 | 44.000 | 4.400 | Dishut/KPH | |
| 3 | 28 | 03 | 105 | 02 | Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan | Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan | Ha | | 5.000 | 400 | 5.000 | 440 | 5.000 | 484 | 5.000 | 532 | 20.000 | 1.856 | Dishut/KPH | |
| 3 | 28 | 03 | 105 | 03 | Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan | Jumlah Operasi Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan | Operasi | | 10 | 400 | 10 | 440 | 20 | 500 | 20 | 550 | 60 | 1.890 | Dishut/KPH | |
| 3 | 28 | 03 | 105 | 04 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan | Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan | Dokumen | | 1 | 250 | 1 | 275 | 1 | 303 | 1 | 333 | 4 | 1.160 | Dishut/KPH | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|-----|----|---|--|-----------------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|------------|--|
| 3 | 28 | 03 | 105 | 05 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan | Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun | Laporan | 1 | 300 | 1 | 1.000 | 1 | 1.100 | 1 | 1.210 | 4 | 3.610 | Dishut/KPH | |
| 3 | 28 | 03 | 106 | | Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) | Jumlah Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu yang Terasilitasi | Unit Manajemen | 20 | 1.525 | 20 | 1.678 | 20 | 1.845 | 20 | 2.030 | 80 | 7.078 | | |
| 3 | 28 | 03 | 106 | 02 | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHHBK) melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | Jumlah Permohonan PBPBH Bukan Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilayani | Unit Manajemen | 20 | 350 | 20 | 385 | 20 | 424 | 20 | 466 | 80 | 1.624 | Dishut/KPH | |
| 3 | 28 | 03 | 106 | 03 | Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya | Jumlah Unit Manajemen PBPBH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi | Unit Manajemen | 20 | 825 | 20 | 908 | 20 | 998 | 20 | 1.098 | 80 | 3.829 | Dishut/KPH | |
| 3 | 28 | 03 | 106 | 04 | Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu | Jumlah Unit Manajemen PBPBH HHBK Skala Kecil dan Menengah yang Memiliki Hak Akses SI-RPBBPBH | Unit Manajemen | 15 | 350 | 15 | 385 | 15 | 424 | 15 | 466 | 60 | 1.624 | Dishut/KPH | |
| 3 | 28 | 03 | 107 | | Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun | Jumlah Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan Kayu yang Terasilitasi | Unit Manajemen | 20 | 800 | 20 | 880 | 20 | 968 | 20 | 1.065 | 20 | 3.713 | | |
| 3 | 28 | 03 | 107 | 01 | Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun | Jumlah Unit Manajemen yang Melaksanakan Tertib Pelaporan RKOPHH untuk Pemegang PBPBH (Kayu dan HHBK) Skala Usaha Kecil dan Menengah | Unit Manajemen | 15 | 350 | 15 | 385 | 15 | 424 | 15 | 466 | 60 | 1.624 | Dishut/KPH | |
| 3 | 28 | 03 | 107 | 02 | Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPBH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi | Dokumen | 1 | 300 | 1 | 330 | 1 | 363 | 1 | 399 | 4 | 1.392 | Dishut/KPH | |
| 3 | 28 | 03 | 107 | 03 | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan Kapasitas Produksi <6000 m3 /Ta melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | Jumlah Permohonan PBPBH Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilayani | Unit Manajemen | 5 | 150 | 5 | 165 | 5 | 182 | 5 | 200 | 20 | 696 | Dishut/KPH | |
| 3 | 28 | 03 | 109 | | Perbenihan Tanaman Hutan | Jumlah Pengadah benih/bibit yang bersertifikat | Unit | 3 | 225 | 3 | 248 | 3 | 272 | 3 | 299 | 3 | 278 | | |
| 3 | 28 | 03 | 109 | 01 | Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar | Jumlah Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Perorangan dan Badan Usaha Non Perhutani) Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Benih, Pengadaan dan Pengedaran Bibit, Serta Pengadaan dan Pengedaran Benih dan Bibit Dalam Provinsi | Unit Usaha | 1 | 30 | 1 | 33 | 1 | 36 | 1 | 40 | 4 | 139 | Dishut/KPH | |
| 3 | 28 | 03 | 109 | 02 | Sertifikasi Sumber Benih | Terlaksananya Sertifikasi Sumber Benih | Sertifikat | 1 | 30 | 1 | 33 | 1 | 36 | 1 | 40 | 4 | 139 | Dishut/KPH | |
| 3 | 28 | 03 | 109 | 03 | Sertifikasi Mutu Benih | Terlaksananya Sertifikasi Mutu Benih | Sertifikat | 1 | 30 | 1 | 33 | 1 | 36 | 1 | 40 | 4 | 139 | Dishut/KPH | |
| 3 | 28 | 03 | 109 | 04 | Sertifikasi Mutu Bibit | Terlaksananya Sertifikasi Mutu Bibit | Sertifikat | 1 | 30 | 1 | 33 | 1 | 36 | 1 | 40 | 4 | 139 | Dishut/KPH | |
| 3 | 28 | 03 | 109 | 05 | Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit | Jumlah Data (Asal Usul, Jenis Mutu) Benih Atau Bibit yang Beredar | Laporan | 1 | 30 | 1 | 33 | 1 | 36 | 1 | 40 | 4 | 139 | Dishut/KPH | |
| 3 | 28 | 03 | 109 | 06 | Pembangunan Sumber Benih | Luas Sumber Benih yang Dibangun | Ha | 1 | 75 | 1 | 83 | 1 | 91 | 1 | 100 | 4 | 348 | Dishut/KPH | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|-----|----|---|--|----------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|------------|--|
| 3 | 28 | 04 | | | PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA | Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan | | 31,61 | 31,61 | - | 31,69 | 74 | 31,77 | 100 | 31,85 | 100 | 126,92 | 274 | | |
| 3 | 28 | 04 | 102 | | Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convention On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi | Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam lampiran CITES | Laporan | | | - | 1 | 74 | 1 | 100 | 1 | 75 | 3 | 249 | | |
| 3 | 28 | 04 | 102 | 01 | Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES | Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam lampiran CITES | Laporan | | | | 1 | 74 | 1 | 100 | 1 | 75 | 3 | 249 | Dishut | |
| 3 | 28 | 04 | 103 | | Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam | Luas Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting yang Dikelola | Ha | | | - | | | | - | 1 | 25 | 1 | 25 | | |
| 3 | 28 | 04 | 103 | 06 | Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi | Luas Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting yang Dikelola | Ha | | | | | | | 1 | 25 | 1 | 25 | Dishut | | |
| 3 | 28 | 05 | | | PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN | Jumlah Kelompok Tani Hutan (KTH) yang diberikan akses legal (kumulatif) | KTH | | 142 | | 149 | 157 | | 164 | | 612 | | | | |
| | | | | | | Jumlah Kelompok Tani Hutan (KTH) yang dibina (kumulatif) | KTH | | 122 | 5.441 | 128 | 12.209 | 135 | 2.100 | 141 | 2.100 | 526 | 21.850 | | |
| 3 | 28 | 05 | 101 | | Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan | Jumlah KTH Yang dibina | KTH | | 60 | 5.441 | 60 | 12.209 | 60 | 2.100 | 60 | 2.100 | 60 | 21.850 | | |
| 3 | 28 | 05 | 101 | 01 | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan | Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas | Orang | | 23 | 400 | 23 | 440 | 23 | 450 | 23 | 200 | 92 | 1.490 | Dishut/KPH | |
| 3 | 28 | 05 | 101 | 02 | Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan | Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan | Kelompok | | 40 | 3.500 | 60 | 10.269 | | 15 | 400 | 115 | 14.169 | Dishut/KPH | | |
| 3 | 28 | 05 | 101 | 03 | Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial | Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial | Ha | | 5000 | 1.541 | 5000 | 1.500 | 5000 | 1.650 | 5000 | 1.500 | 20000 | 6.191 | Dishut/KPH | |
| 3 | 28 | 06 | | | PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) | Cakupan implementasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) | Persen | | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 300 | | |
| 3 | 28 | 06 | 101 | | Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Jumlah Dokumen Pengelolaan DAS | Dokumen | | | - | | 100 | | 100 | | 100 | 0 | 300 | | |
| 3 | 28 | 06 | 101 | 01 | Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan DAS yang Ditetapkan | Dokumen | | | | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 40 | 3 | 140 | Dishut | |
| 3 | 28 | 06 | 101 | 02 | Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS | Jumlah Dokumen Sinkronisasi dan Koordinasi Optimalisasi DAS | Dokumen | | | | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 40 | 3 | 140 | Dishut | |
| 3 | 28 | 06 | 101 | 05 | Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS | Jumlah Lembaga yang Dibentuk dan Dikembangkan dalam Forum Pengelolaan DAS | Lembaga | | | | | | | 1 | 20 | 1 | 20 | Dishut | | |

BAB VII.

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara yang mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Maluku Utara tahun 2020 - 2024 adalah sebagai berikut :

Misi 4 - Membangun Perekonomian Daerah yang Inklusif dan Berkualitas dengan Orientasi pada Nilai Tambah dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan

Tujuan RPJMD - Mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan, berketahanan bencana dan perubahan iklim;

Sasaran RPJMD - Terwujudnya pembangunan yang berwawasan lingkungan, berketahanan bencana dan perubahan iklim; dengan mendorong peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, dan penurunan Indeks Risiko Bencana Provinsi.

Strategi RPJMD - Meningkatkan pengendalian keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Indikator Kinerja RPJMD - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Target capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dalam RPJMD yang akan didukung oleh Dinas Kehutanan untuk periode 2020- 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 27. Target capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dalam RPJMD 2020-2024

| No. | Indikator | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD |
|-----|----------------------------------|---|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|--|
| | | | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 | |
| 1. | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | 75,94 | 74,30 | 77,32 | 77,51 | 77,71 | 77,90 | 77,90 |

Penghitungan IKLH terdiri dari tiga komponen yaitu: Indeks Kualitas Air (IKA); Indeks Kualitas Udara (IKU); Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dan Indeks Kualitas Air Laut.

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara tahun 2020 - 2024 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku Utara tahun 2020 - 2024 serta merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Rencana Strategis (Renstra) memuat tujuan, sasaran, kebijakan, program dan indikator kinerja yang akan menjadi pedoman penyusunan rencana kerja tahunan dan sebagai dasar penetapan kinerja serta penilaian kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara beserta seluruh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kesatuan Pengeloan Hutan (KPH) yang ada di bawah Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara.

Akhirnya dengan tersusunnya Renstra ini diharapkan dapat menjawab dan memfokuskan upaya Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara dalam menghadapi tantangan pembangunan kehutanan kedepan, terjadinya sinkronisasi pembangunan serta dapat mewujudkan Visi dan Misi RPJMD Provinsi Maluku Utara 2020-2024.



DINAS KEHUTANAN PROVINSI MALUKU UTARA

